

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN  
PENGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT  
KAMPANYE POLITIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) dalam Prody Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah)  
Fakultas Syariah**

Oleh:

**YUNNITA  
NPM: 1521020308**

**Program studi: HUKUM TATA NEGARA (Siyasah  
Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H/2019M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN  
PENGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT  
KAMPANYE POLITIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) dalam Prody Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah)  
Fakultas Syariah**



**Pembimbing 1 :Dr. Alamsyah,S.Ag.,M.Ag**

**Pembimbing 2 : Relit Nur Edi, S.AG., M.KOM.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H/2019M**

## ABSTRAK

Kampanye adalah kegiatan untuk mempromosikan diri bagi calon dan wakil calon kepala daerah kepada masyarakat di wilayahnya untuk memilih mereka untuk menjadi pemimpin daerah.. Dalam kampanye juga terdapat ketentuan dan hal- hal yang dilarang salah satunya menggunakan tempat ibadah untuk kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Yang Terdapat Dalam Pasal 69 huruf I yaitu, larangan menggunakan tempat pendidikan dan tempat ibadah. Namun dalam sejarah islam masjid pada masa Rosululloh saw memang memiliki berbagai fungsi selain tempat ibadah diantaranya tempat pusat pemerintahan yang termasuk didalamnya adalah politik dan kampanye merupakan bagian dari politik.

Permasalahannya adalah bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap masjid sebagai tempat kampanye?. Dan bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye?.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada dipergustakaan yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Sumber data yang digunakan primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara pendekatan komperatif dan pendekatan historis. Metode pengolahan data melalui tiga tahap yaitu tahap pemisahan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*systematizing*). Metode analisa data menggunakan metode kualitatif dengan kerangka berfikir induktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah jika dilihat dari segi fungsi masjid masa Rasulullah SAW masjid

memang berfungsi sebagai pusat pemerintahan termasuk politik namun, seiring dengan perkembangan zaman, sistem pemerintahan, ideology Negara, jumlah penduduk, luas wilayah, serta perpecahan beberapa Negara islam, tentu fungsi masjid sudah tidak bisa disamakan dengan masa klasik. Apa bila kampanye dilakukan di masjid yang tidak semua jamaahnya bersimpati kepada partai politik atau tokoh yang sedang berkampanye dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antar jamaah masjid yang ada. Lagi pula pada saat kampanye pasti akan mengagungkan nama partai atau nama tokoh yang sedang berkampanye dimana di dalam masjid dilarang mengagungkan nama selain nama Allah SWT.







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENGGUNAAN  
LARANGAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE  
POLITIK**

**Nama : Yunnita**

**NPM : 1521020308**

**Jurusan : Siyasaah Syar'iyah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung**

**Bandar Lampung, Maret 2019**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Alimghyah S. Ag., M. Ag.  
NIP.197009011997031002**

**Relit Nur Edi, S. Ag., M. Kom. I.  
NIP.196901051998031003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasaah**

**Drs. Susiadi A.S., M. Sos. I.  
NIP.195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP  
LARANGAN PENGGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE  
POLITIK, disusun oleh: Yunnita, NPM: 1521020308, program studi: Hukum  
Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam siding Munaqosyah  
di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Senin, 15  
April 2019**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua Sidang : Drs. Susiadi A.S., M.Sos.I.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**Dekan**

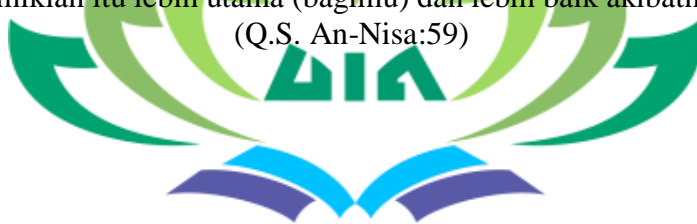
**Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
NID.19700901197031002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
(Q.S. An-Nisa:59)





## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah tercinta, Yuswan, berkat doa restu darinyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih ayahku yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan putrimu yang kamu sayangi
2. Ibu tersayang, Zauni, terimakasih atas nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan ibu berikan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, dan merawatku hingga menjadi seperti ini. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak sejujung kuku pun dapat membalas perjuangan kalian tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit membahar rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua dan sedikit membayar lelah dan letih atas perjuangan kalian.
3. Kakak ku tercinta satu satunya, Zainul Hakim, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa mu kepada penulis. Semoga allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepadamu.



## RIWAYAT HIDUP

Yunnita, lahir pada tanggal 13 November 1996 di Desa Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yuswan dan Ibu Zauni. Beralamat di Lumbok Ujung, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SD N 1 Lumbok Seminung pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N I Lumbok Seminung tahun 2009. Selama duduk dibangku SMP penulis menjadi anggota pramuka, paskibra dan paduan suara.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA N 2 Liwa pada tahun 2012. Selama penulis menempuh pendidikan penulis aktif dibidang ekstrakurikuler paskibra sebagai anggota.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyash.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbilalamin*, betapa banyak nikmat yang Allah SWT berikan. Berkat kemurahan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Masjid Sebagai Media Kampanye. Shalawat beriring salam semoga selalu menggema kepada kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan, pengorbanan dan keberaniannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang penuh kedamaian seperti saat ini

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Skripsi ini tak akan selesai tanpa waktu dan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.KOM.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama

menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

5. Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Staf Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Untuk teman-temanku yang telah menjadi saudaraku, jurusan Siyasah angkatan 2015, khususnya kelas E mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasinya kepada penulis.
7. Kepada sahabat –sahabat seperjuanganku (Afriza Yanti, Elisa Septiyona, Ika Apriana, Zaqiyatunnisak Repi Susanti, Tiara Virginia Jasmine, Desti, dan Karisma) yang selalu ada disaat penulis mulai lelah dan kurang semangat dalam mengerjakan skripsi.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang aku banggakan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mohon maaf jika namanya tidak disebutkan satu-persatu.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ridha dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'Alamin*. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Maret 2019

**YUNNITA**  
**NPM. 1521020308**



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang .....	4
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8

### **BAB II MASJID DAN POLITIK DALAM ISLAM .....11**

A. Pengertian Masjid dan Sejarah Dulu dan Sekarang ..	11
B. Kedudukan dan Fungsi Masjid.....	19
C. Politik dan Pengertiannya.....	24
D. Etika Politik dalam Islam .....	29
E. Penggunaan Sarana Ibadah Untuk Tujuan dan Alat Politik .....	36

### **BAB III PENGGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT**

#### **KAPANYE DI INDONESIA .....51**

A. Pengertian Kampanye dan Peraturan-Peraturannya ..	51
B. Cara-Cara Kampanye dalam Hukum Positif .....	55
C. Kampanye Menurut Undang-Undang Di Indonesia .....	62

D. Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye dalam Undang-Undang .....	67
E. Kasus-Kasus Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Di Indonesia .....	72
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>75</b>
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye.....	75
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Mengenai Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*”) untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Analisis** adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab), duduk perkaranya dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang dapat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat pula diartikan dengan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>1</sup>
2. **Fiqh siyasah** secara terminologis, menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang didusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dari

---

<sup>1</sup>Ebta Stiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa,2016)



ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.<sup>2</sup>

Secara terminologis dalam lisan al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>3</sup>

3. **Masjid** adalah Secara *etimologi*, masjid berarti tempat beribadah. Akar dari masjid adalah *sajada* dimana *sajada* berate sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berasal dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata masjid ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sesembahan”. Secara *terminologi*, masjid asal katanya mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakikat dari masjid adalah tempat melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu, masjid dapat diartikan lebih luas, bukan hanya tempat shalat saja namun juga dapat digunakan untuk melakukan segala kegiatan kaum muslim yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah swt<sup>4</sup>
4. **Tempat** adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh, menyimpan, meletakkan, dan sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 22.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 23.

<sup>4</sup>Nur Handriyat Alsyah, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat* (Malang: UIN Maliki Press), h 51-56

<sup>5</sup>Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta: pusat bahasa, 2008), hal. 1693

5. **Kampanye** menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif.<sup>6</sup>
6. **Politik** adalah masalah yang menyangkut segala macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.

Dari penjelasan beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini focus kepada bagaimana penggunaan masjid sebagai tempat kampanye menurut fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif
  - a. Didalam pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 melarang melaksanakan kampanye ditempat ibadah dan tempat pendidikan. Akan tetapi bila ditinjau dari fungsi masjid pada masa Rosulullah masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja akan tetapi dapat juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan termasuk kegiatan politik. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena antara hukum Islam dan Hukum positif terdapat perbedaan.

---

<sup>6</sup>Venus Antar, *Menejemen Kampanye;Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengfektifkan Kampanye Komunikasi*.(Bandung:Simbiosis Rekaatam Media, 2004), H. 20.

## 2. Alasan subjektif

- a. Penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di jurusan siyasah fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya berbagai literature yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

## C. Latar Belakang

Kampanye merupakan tahap mempromosikan diri bagi pasangan calon kepala daerah agar masyarakat memilihnya. Definisi kampanye menurut para tokoh diantaranya. Rogers Dab Storey, ia mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar halayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Selain itu Pfau dan Parrot mengartikan Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Menurut Leslie B. Snyder Kampanye Komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup> Menurut Raja sundraman Kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu

---

<sup>7</sup>Venus Antar, *Menejemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2012),h.8.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 8.



berikut pemecahannya.<sup>9</sup>Di dalam fiqh siyasah memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengidentifikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni penawaran diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>10</sup>

Kampanye diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada pasal 63 sampai pasal 74 diatur mengenai waktu pelaksanaan dan tatacara pelaksanaan kampanye. Dalam kampanye terdapat juga hal-hal yang dilarang seperti yang terdapat pada pasal 69 huruf i yaitu larangan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye. Tentu dalam hal ini antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terdapat perbedaan.

Secara *etimologi*, masjid berarti tempat beribadah. Akar dari masjid adalah *sajada* dimana *sajada* berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berasal dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata masjid ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sesembahan”.

Secara *terminology*, masjid asal katanya mengandung arti tunduk dan patuh, maka hakikat dari masjid adalah tempat

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 8.

<sup>10</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta:GOZIAN Press,2013), hal 128

melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu, masjid dapat diartikan lebih luas, bukan hanya tempat shalat saja namun juga dapat digunakan untuk melakukan segala kegiatan kaum muslim yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah swt.<sup>11</sup>

Semenjak Islam datang, Rasulullah bermaksud ingin menyatukan suku-suku bangsa ini, dengan jalan menyediakan tempat pertemuan. Di tempat ini penduduk dapat bertemu untuk mengerjakan ibadah dan pekerjaan-pekerjaan atau upacara-upacara lain. Maka Rasulullah mendirikan sebuah masjid, dan diberi nama "Baitullah". Di masjid ini kaum Muslimin dapat bertemu mengerjakan ibadah, belajar, mengadili perkara-perkara, jual beli dan upacara-upacara lain.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi masjid pada masa Rasulullah tidak hanya sebagai tempat ibadah kepada Allah swt, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak masyarakat yang berkesan mengenai masalah-masalah sosial dan memenuhi keperluan masyarakat. Oleh karena itu masjid dapat juga digunakan untuk kegiatan politik akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 masjid dilarang digunakan untuk berkampanye yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan politik.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa didalam Islam masjid tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah saja akan tetapi masjid terutama pada masa Rasulullah saw merupakan pusat pemerintahan yang artinya termasuk kegiatan politik juga dilakukan di masjid. Sedangkan didalam

---

<sup>11</sup>Nur Handriyat Alsya, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet.VI (Jakarta Pusat:Pustaka Alhusna,1992),h. 117.

hukum positif terdapat larangan untuk menggunakan masjid sebagai media kampanye yang merupakan salah satu bagian dari politik. Akan tetapi penulis berfikir mungkin dikarenakan pada masa Rosululloh saw tidak tersedianya tempat dan hanya ada masjid yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan sedangkan pada masa modern ini sudah banyak tersedia tempat-tempat yang dapat digunakan untuk pusat pemerintahan sehingga masjid sudah tidak digunakan lagi kegiatan politik.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap masjid sebagai sarana kampanye?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk menjelaskan mengenai perspektif fiqh siyasah terhadap masjid sebagai sarana kampanye.
  - b. Untuk menjelaskan mengenai perspektif fiqh siyasah mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.
2. Kegunaan Penelitian:
  - a. Kegunaan secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna:

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara penelitian skripsi ini.
  - 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan kegiatan kampanye menggunakan media masjid
- b. Kegunaan secara praktis yaitu:
- 1) Untuk memperluas pengetahuan penulis.
  - 2) Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.<sup>13</sup>

#### **b. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis dan Normatif. Deskriptif-Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskrikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan tentang kampanye dan masjid. Normatif karena

---

<sup>13</sup>Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara,2005),h.25

mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis dalam buku-buku fiqh klasik, hadits Nabi SAW, maupun hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

## **2. Data dan sumber data**

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, di perlukan adanya data yang tersedia dari:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah: data diperoleh dari perpustakaan, sumber bahan primer:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadits
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4) Buku-buku atau bahan perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah: data yang bahannya didapat dari penelitian, jurnal, skripsi dan media yang terkait dengan masalah penelitian.<sup>15</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini

---

<sup>14</sup> Abdul Malik Ghazali, Aborsi Antara Hukum Dan Dilemma Perempuan, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.9 No.1, Juni 2010, h. 201.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006),h. 30.



penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*pomparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*)

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melali tahap pemisahan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*recontrcting*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

#### **5. Metode Analisa Data**

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. Selain itu juga dapat menggnakan teknikkomparatif yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum Positif.

## BAB II

### MASJID DAN POLITIK DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Masjid dan Sejarah Dulu dan Sekarang

##### 1. Pengertian masjid

Masjid menurut bahasa berasal dari kata masjid merupakan isim yang diambil dari kata sujud; bentuk dasarnya adalah sajada-yasjudu yang berarti tempat bersujud. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah shalat beralaskan *Al-Khumrah*. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Ambilkan saya *Al-Khumrah* dari masjid”.<sup>16</sup> Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjama’ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin.<sup>17</sup>

Masjid menurut istilah, menurut Az-Zujaj, semua tempat ibadah disebut masjid. Bukankah Rasulullah bersabda, “Dan kujadikan untukku bumi sebagai masjid dan tempat yang suci”.sedangkan, Az-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai tempat ibadah, seperti definisi yang dilontarkan Az-Zujaj. Selain itu ia menduga pemilihan kata masjid untuk menyebut tempat shalat adalah karena sujud merupakan perbuatan yang baik dalam shalat untuk mendekatkan diri kepada Allah. *Ism Al-Makan* dari kata sujud adalah masjid.<sup>18</sup>

Masjid dalam al-qur’an sebagaimana pengertian diatas, diungkapkan dalam dua sebutan. Pertama,

---

<sup>16</sup> Huri Yasin Husain, *Fiqh Masjid*,(Jakarta:Al-Kutub Al-Ilmiyah,2011) Hal, 9

<sup>17</sup> Mohammad, E. Ayub, *Manajemen Masjid*,(Jakarta: Gema Insani,1996),Hal,1-2

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.11-12

“masjid”, suatu sebutan yang langsung menunjuk pada pengertian tempat peribadatan umat islam yang setingkat dengan tempat-tempat ibadah agama lain selain agama islam.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا  
رَبُّنَا اللَّهُ ۖ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ  
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ  
اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝١٦

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanya Allah”. Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah kaum Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang menolong agama-Nya.

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an Surat Al-Hajj:40

*Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat dan Maha Perkasa. (Q.S.Al-Hajj:40).*<sup>20</sup>

Kedua, “*bayt*” yang juga menunjukkan kepada dua pengertian, pertama tempat tinggal sebagaimana rumah untuk manusia atau sarang untuk binatang dan kedua “*bayt Allah*”.

Wahyudin Sumpeno berpendapat bahwa masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya *sujudan*, *sujudan* yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga masjid mengandung arti tempat melakukan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan shalat lima waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt. Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi, kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat ibadah bagi umat Islam.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana hadits Riwayat Abu Hurairah.

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ  
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا أَقْبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
سَاجِدًا<sup>٢٢</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung,: PT Sigma Examedia Arkanleema,Tt) Hal. 337

<sup>21</sup> Wahyudin Sumpeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*.Ed.Abdul Hamid, (Bandung:Remaja Rosdakarya.Cetakan 1, 1984), Hal.1

<sup>22</sup> *Hadits Shoheh Bukhari Dan Muslim*

Artinya: “semoga Allah Swt melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah”<sup>23</sup>

Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf Al-Qordhawi, “masjid merupakan rumah Allah Swt, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan menyembah-Nya dengan baik”.<sup>24</sup> Hal ini disarankan pada firman Allah surat an-Nur ayat 36-37:



Artinya: “(cahaya itu) di rumah-rumah atau masjid yang disana telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan

---

<sup>23</sup> Muhammad Faud Abdul Baql, *Al-Lu'lu' Wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim, Jilid I*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ed. Darmadi, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), Hal.7

<sup>24</sup> Yusuf Al-Qordhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Ter Abdul Hayyie Al- Kattani, Ed. Darmadi*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000), Hal 7

<sup>25</sup> *Al-Qur'an Surat An-Nur:36-37*



*(dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.<sup>26</sup>*

Sependapat dengan Yusuf Al-Qordhawi, Fachrudin Hs mengemukakan:

Masjid adalah rumah peribadatan kaum muslimin. Disitu mereka mengerjakan shalat jama'ah dan shalat jum'at, zikir, menyebut dan mengingat Allah serta memohon do'a kepada-Nya. Disitu mereka membaca, belajar dan mengajar kitab suci Al-Qur'an. Setiap waktu mereka melakukan shalat jama'ah (sembahyang kaum-kaum) dan setiap hari jum'at mengadakan shalat jum'at secara jama'ah yang lebih ramai.

Dalam masjid kaum muslim mendengarkan pengajian dan pengetahuan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari, berkenaan dengan kehidupan dan pencaharian rezeki atau hubungan dengan masyarakat. Pengunjung masjid bertemu bertatap muka setiap saat, sehingga dapat saling mengenal dari dekat, mengetahui keadaan masing-masing serta berbincang langsung dari hati ke hati dalam berbagai persoalan. Peristiwa yang terjadi pada diri anggota jama'ah masjid, suka dan duka, dapat diketahui dengan cepat dan bisa dilakukan dengan tindakan segera secara bersama.<sup>27</sup>

Dengan demikian ditinjau dari berbagai pendapat diatas mengenai pengertian masjid, dapat ditarik kesimpulan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dalam arti sempit, akan tetapi pengertian

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Hal. 608

<sup>27</sup> Fachrudin Hs, *Eksiklopedia Al-Qur'an, Jilid II*, (Jakarta:Rineka Cipta, Cetakan I, 1992), Hal. 78

masjid mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, masjid juga dapat mencakup proses pembentukan budaya Islam dimana didalamnya tercakup pula proses pendidikan.

## 2. Sejarah Masjid

Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam atau Bitullah (rumah Allah) juga memiliki sejarah yang cukup signifikan untuk dikaji. Fakta sejarah membuktikan bahwa sesampainya nabi Muhammad Saw disebuah desa kecil bernama Quba' pada hari senin 12 Rabi'ul Awal 1 H, disini mereka beristirahat lebih kurang empat hari dan hari yang sedikit ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk mendirikan sebuah masjid, yang sampai saat ini dikenal dengan nama masjid Quba' sesuai dengan tempat masjid tersebut berada.<sup>28</sup>

Sesuai yang dinyatakan didalam hadits shahih, tempat-tempat mulia dimuka bumi adalah ketiga masjid yaitu: Makkah, Madinah, dan Baitulmaqdis..

Al-Baitul Haram (asal mula masjidil haram) Allah Swt memerintahkan Ibrahim As untuk membangun sebuah masjid di Makkah yang merupakan bait Ibrahim As, serta mengajak manusia melaksanakan ibadah haji di sana. Ibrahim pun membangunnya bersama putranya Ismail As.<sup>29</sup>

Baitul Maqdis adalah masjid Aqsa, didirikan oleh nabi Daud As dan nabi Sulaiman As. Allah memerintahkan mereka membangun masjid dan

---

<sup>28</sup> Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam di Zman Rasulullah Saw.* (Jakarta: 1976), Hal. 93

<sup>29</sup> Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, Ter, Ahmadie Thoha. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Hal.405

mendirikan monument-monumennya. Banyak makam nabi, putra-putra Ishaq As disekitar masjid Aqsa.

Madinah merupakan tempat Nabi Muhammad Saw melakukan hijrah dari Makkah. Maka hari jum'at 16 Rabiul awal Rasulullah tiba bersama dengan Abu Bakar dengan selamat. Kaum Anshor menyambut kedatangan Rasulullah dengan gembira. Maka ditengah-tengah kegembiraan itu unta Rasulullah berjalan pelan sampai akhirnya berhenti pada sebidang tanah kepunyaan dua orang anak yatim, Sahl dan Suhail, namanya dari Bani Najjar. Ditempat itulah Rasulullah turun yang telah diberkati dan ditentukan Allah untuk menjadi tempat Rasul-Nya di Madinah. Tanah yang bertuah ini dibeli Rasulullah dari yang empunya dan disana didirikanlah rumah dan masjid nabi yang terkenal dengan nama "Masjid An-Nabawi", yang sampai saat ini masih berdiri dengan gayanya sebagai lambing kesucian dan kebesaran umat Islam.<sup>30</sup>

Di Indonesia masjid-masjidnya juga memiliki sejarah yang cukup unik, dan biasanya masjid-masjid tersebut menjadi pusat ziarah yang bramai dikunjungi terutama pada hari-hari tertentu. Biasanya masjid yang dibangun atau berhubungan dengan wali, dengan orang keramat atau Ulama' terkenal, kadang-kadang juga berhubungan dengan seorang raja. Di Jawa masjid yang diziarahi terutama yang berhubungan dengan Wali Songo.<sup>31</sup>

Masjid Demak, termasuk diantara masjid yang termashur, karena menurut sejarahnya ia dibangun oleh delapan wali (kepedekan dari waliyullah) adalah orang

---

<sup>30</sup> Rus'an, Op Cit. hal 94

<sup>31</sup> Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*.(Jakarta:Pustaka Al-Husna, Cet V,1989). Hal. 255

yang dianggap dekat dengan tuhan, karena itu mereka dianggap keramat. Karena masjid Demak didirikan oleh orang-orang keramat maka masjid ini pun dianggap keramat. Dengan demikian masjid ini menjadi sasaran ziarah.

Salah satu masjid tertua di Pulau Jawa adalah masjid Agung di Cirebon, didirikan kira-kira Abad ke-XVI. Juga masjid ini masih dihubungkan dengan para wali. Bagian yang terutama dianggap keramat adalah ruangan yang dilingkupi serambi, bagian asli masjid, karena dipercayai bahwa para wali pernah memimpin shalat jum'at ditempat ini.<sup>32</sup>

Masjid Banten yang didirikan oleh pangeran Muhammad pada tahun (1562-1595 M) ini termasuk masjid tertua juga di Jawa. Dibagian utara dibagian pekarangan terletak makam para sultan, sehingga masjid ini digolongkan sebagai jenis masjid makam. Raja pertama Banten dan sekaligus juga pengembangan ajaran islam yaitu Sultan Hasanuddin juga dimakamkan disitu.

Selain masjid tertua, masjid tua diindonesia jg terletak di Jawa yaitu masjid Ampel yang dibangun oleh Sunan Ampel (wafat 1481M), beliau juga seorang mubaligh Islam pertama di Jawa. Setelah beliau wafat juga dimakamkan disekitar masjid ini. Oleh karena itu masjid ini tetap diziarahi dan dikeramatkan hingga saat ini.

Masjid Agung Jogjakarta dan Surakarta penting kedudukannya sebagai masjid kerajaan. Karena itu juga, masjid ini menjadi tempat ziarah umat Islam.

Masjid-masjid diatas merupakan beberapa contoh dari sejarah masjid Dipulau Jawa yang dikultuskan diziarahi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 256

umat Islam. Anehnya diluar jawa jarang sekali masjid yang dianggap keramat, oleh karena itu otomatis jarang menjadi sasaran ziarah umat Islam. Selain di Jawa maka masjid di Butonlah yang dianggap sebagai keramat dan menjadi sasaran ziarah karna disana terdapat makam Sultan Murhum yang dianggap keramat. Ia masuk Islam sekitar tahun 1558 M, setelah mualaf ia membangun sebuah masjid dimana hingga saat ini masjid tersebut berumur 500 tahun.

Pada abad terakhir dari sejarah negeri yang didatangi Islam terdapat gejala bahwa masjid hanya tempat ibadah shalat saja. Disisi lain terdapat pula kenyataan-kenyataan sebagai efek bahwa masjid hanya tempat ibadah shalat saja, betapa meningkatnya kekudusan masjid. Kekudusan ada yang meningkat menjadi keramat dalam anggapan masyarakat sekitar masjid. Hal ini apa bila ditinjau dari fungsi masjid pada masa Rasulullah tentu sudah tidak sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan Rasulullah mengenai fungsi masjid. Sehingga sudah tidak sesuai dengan konsep Islam tentang masjid.

## **B. Kedudukan dan Fungsi Masjid**

Fungsi masjid yang paling utama adalah tempat sujud kepada Allah Swt, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Sedangkan fungsi masjid menurut Muh. Ayubi secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu; “(1) sebagai tempat ibadah (2) sebagai tempat pendidikan agama (3) sebagai tempat kegiatan sosial kemasyarakatan.”<sup>33</sup>

Masjid merupakan kelembagaan pokok dalam Islam. Keinginan dan kecenderungan masyarakat Islam melebihi

---

<sup>33</sup> Moh.E. Ayub, Muhsin MK, *Managemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996) Hal.7



lembaga-lembaga lainnya. Sejak Islam datang ke Indonesia hingga sekarang pada setiap kelompok pemukiman, yang pertama mereka dirikan adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah sekaligus merupakan symbol keagamaan mereka.

Selain masjid dikenal pula Langgar atau Mushala. Dibeberapa daerah bahkan untuk semacam langgar disebut surau atau meunasah. Dalam hal fungsinya, masjid kecuali untuk shalat fardhu 5 waktu juga untuk shalat jum'at. Sedangkan langgar hanya untuk shalat fardhu 5 waktu saja itu pun hanya dapat menampung untuk jumlah yang kecil.

Fungsi masjid merupakan pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Adapun yang dimaksud kegiatan peribadatan adalah:

- 
- a) Shalat fardhu
  - b) Shalat jum'at
  - c) Shalat rawatib
  - d) Shalat tarawih dan shalat-shalat yang lainnya
  - e) I'tikaf.

Yang dimaksud dengan kegiatan kemasyarakatan adalah: semua kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan umat Islam, termasuk didalamnya masalah pendidikan, pembinaan remaja, kesehatan, kegiatan upacara perkawinan dan sebagainya.

#### 1. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah Saw

- a) Tempat pelaksanaan peribadatan

Peran dan fungsi masjid yang utama adalah tempat shalat dan zikir kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh aktifitas yang diselenggarakan di masjid memiliki orientasi mengingat Allah Swt. Pemanfaatan masjid

hanya untuk sarana pendekatan diri kepada Allah, bukan menyembah selain Allah Swt.<sup>34</sup>

b) Tempat pertemuan

Pada masa Rasulullah Saw masjid menjadi tempat pertemuan atau *convention center* yang dipergunakan oleh Rasulullah dalam pertemuan-pertemuan penting bersama para sahabatnya secara rutin. Pertemuan yang diselenggarakan ini bertujuan untuk mempererat hubungan Rasulullah bersama para sahabat.

c) Tempat berkonsultasi

Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sebagai komunitas baru yang berdomosili di kota Madinah, masalah-masalah terkait dengan urusan pribadi, keluarga, maupun urusan umat secara keseluruhan yang muncul dan memerlukan penyelesaian. Para sahabat membawa permasalahan yang ada ke dalam masjid dalam rangka berkonsultasi kepada Rasulullah. Oleh karena itu, masjid pada zaman Nabi Saw berfungsi sebagai tempat berkonsultasi (semacam kantor dewan penasehat agung), baik dalam merencanakan suatu masalah maupun memecahkan sebuah persoalan umat.

d) Tempat kegiatan sosial

Pada masa Rasulullah, permasalahan sosial yang dihadapi tidak sedikit. Karena itu banyak para sahabat yang datang meminta bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi perjuangan. Dan juga masalah-masalah lainnya seperti masalah kemiskinan yang hingga saat

---

<sup>34</sup> Asep Usman Ismail dan Cecep Cstrawijaya, *Manajemen Masjid* (Bandung:Angkasa,2010) Hal.14

ini masih terjadi. Untuk mengatasi masalah sosial itu Rasulullah dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah melalui masjid, lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang membutuhkan.

e) Tempat pengobatan orang sakit

Pada masa Rasulullah Saw, pusat-pusat pengobatan konvensional yang dikenal pada saat ini yaitu klinik dan rumah sakit, belum didirikan pada saat itu. Sebagai gantinya, masjid difungsikan sebagai balai pengobatan bagi para sahabat yang terluka pada saat perang.

f) Tempat pembinaan ummat dan kegiatan dakwah Islamiyah

Pada masa Rasulullah, masjid juga difungsikan sebagai tempat lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan jama'ah kaum muslim yang baru tumbuh. Rasulullah mempergunakan masjid sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai masalah keagamaan, dan penyelesaian perselisihan-perselisihan.<sup>35</sup>

Masjid pada masa Rasulullah merupakan pusat pembinaan *ruhiyah* (*tarbiyah ruhiyah*) umat Islam, di masjid ini didirikan shalat 5 waktu secara berjama'ah, masjid juga berperan untuk membina dan meningkatkan kekuatan ruhiyah (keimanan) ummatnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal.20

<sup>36</sup> Moh. E. Ayub, Muhsin M.K, *Op Cit*, Hal.73

## 2. Fungsi Masjid Pada Masa Modern

Masjid sebagai pusat kehidupan shalat fardhu yang kita lakukan hendaknya selalu dikerjakan secara berjamaah di masjid. Karena sebagaimana kita ketahui lebih mulia dari pada shalat sendiri<sup>37</sup>

- a. Sebagai sentra peribadatan umat Islam, terutama dalam shalat lima waktu.
- b. Sebagai sekolah, tempat para ulama besar berkumpul dalam mengajarkan ilmu tentang syari'at Islam. Masjid Nabawi di Madinah telah menyebarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam, sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diemban oleh masjid Nabawi yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>
  - 1) Tempat ibadah.
  - 2) Tempat konsultasi dan komunikasi.
  - 3) Tempat pendidikan.
  - 4) Tempat santunan sosial.
  - 5) Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
  - 6) Tempat pengobatan para korban perang.
  - 7) Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
  - 8) Aula dan tempat menerima tamu.
  - 9) Tempat menawan tahanan.
  - 10) Pusat penerangan atau pembelaan agama.

Fungsi dan peranan masjid besar seperti masa keemasan Islam tentunya sulit untuk diwujutkan pada masa modern ini. Karena pada saat ini masjid multi

---

<sup>37</sup> Suprianto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid*, (Jakarta: Cahaya Hukumah, 2003), Hal.17

<sup>38</sup> Budiman Mustafa, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Ziyad, 2007), Hal 27

fungsi seperti pada masa Rasulullah pada saat ini sudah mulai pudar.<sup>39</sup>

### C. Politik dan Pengertiannya

Secara *etimologis*, politik berasal dari kata Yunani kuno yaitu *polis* yang berarti kota atau Negara kota. Kemudian pengertian tersebut berkembang menjadi *polites* atau warganegara, *politeia* atau semua yang berkaitan dengan Negara. Aristoteles adalah orang pertama yang mengenalkan kata politik melalui pengamatannya manusia yang ia sebut *zoon politikon*. Melalui istilah ini ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dalam bahasa Arab disebut *siyasyah*, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi *siyasat*.<sup>40</sup>

Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian yaitu: (a) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (b) segala urusan tindakan (kebijakan, *siyasat*, dan sebagainya) mengenai pemerintah Negara atau terhadap Negara lain; dan (c) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).<sup>41</sup>

Politik dalam bahasa Inggris adalah *politic* yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan.<sup>42</sup> Sedangkan dalam kamus politik, ada empat definisi politik, yaitu:

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal.30

<sup>40</sup> H. Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hal.9

<sup>41</sup> Departemen P Dan K, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet. Ke-8), Hal.694

<sup>42</sup> Wojo Wasito Dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap* (Bandung: Hasta, 1980), Hal.152



1. Perkataan “politik” berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, Negara atau lebih tepat Negara-kota disebut *polis*. Plato ( $\pm$  347 sebelum masehi) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan *politea*, dan muridnya bernama Aristoteles ( $\pm$  322 sebelum masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan *politikon*. Maka “politik” memperoleh arti seni mengatur dan mengurus Negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup seluruh urusan kenegaraan termasuk bentuk, tugas dan lingkungan urusan negara.
2. “Politik” adalah masalah yang menyakut segala macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama Negara), yang berhubungan dengan pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.
3. “Politik” berarti sebuah kebijakan, cara bertindak dan kebijaksanaan.
4. Dalam arti yang lebih luas “politik” diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*polity*) untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>43</sup> Menurut Delier Noer “politik” merupakan berbagai kegiatan dalam satu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik bukan menyangkut tujuan pribadi (*private goals*) melainkan menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Marbu. BN, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal.144-145

<sup>44</sup> Delier Noer, *Pengantar Kepemikiran Politik*, (Medan: Dwipa, 1965, Cet.I), Hal.56

Diantara pengertian politik adalah seperti yang diungkap Lorns Bagus, yaitu:

1. Segala yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. Perkara mengelola, mengarahkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan yang umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara.
3. Bidang studi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.
4. Aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi antar bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan Negara.<sup>45</sup>

Secara umum politik berarti sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap tindakan dan urusan. Dalam kosa kata bahasa Indonesia terdapat kata “*siasat*”, yang berasal dari kata bahasa Arab *siyasah*, karena itu kata *politik/siasat* sangat luas jangkauannya.

Secara epistemology *siyasah* tercakup dalam tema pembahasan yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia tersebut, yang disebut dengan *fiqh siyasah* atau *siyasah ayyar'iyah*. Abdul Wahab Khalaf memberi arti *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah mengelola seluruh masalah bagi Negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan dengan tidak melanggar ketentuan *syar'iyah* dan prinsip-

---

<sup>45</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2000), Hal. 857

prinsip *syar'iyah* yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat imam mujtahid.<sup>46</sup>

Didalam Al-Qur'an tidak terdapat secara eksplisit fungsi dan struktur dari sistem politik, namun dari uraian terdahulu dapat ditemukan adanya unsur-unsur tersebut. Sosialisasi politik misalnya, dapat ditemukan dalam tugas-tugas pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama, termasuk didalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik, dikembangkan dengan sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama. Konsep rekrutmen politik dapat diperoleh dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Adanya syarat-syarat subyektif yang relevan dengan kemampuan individual dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, menghendaki proses seleksi dalam pengangkatan pejabat, dan juga pengisyratan keterbukaan fungsi tersebut bagi setiap warga yang memenuhi syarat.

Tiga fungsi utama yang dikenal dengan fungsi *out put* atau fungsi *legislative* pemerintahan dapat ditemukan dalam kewajiban pemerintah membuat aturan-aturan hukum yang adil, fungsi *eksekurif* melaksanakan hukum-hukum agama dan hukum-hukum perundang-undangan dan fungsi *legislative* melaksanakan tugas-tugas pengadilan terhadap tindakan yang menyerang dan melanggar hukum. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

---

<sup>46</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002) Hal. 24

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ<sup>٤٧</sup> تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ  
 الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا  
 اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ<sup>٤٨</sup> فَلَا  
 تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا<sup>٤٩</sup>  
 وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ<sup>٥٠</sup>

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat  
 di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang  
 menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan  
 perkara orang-orang yahudi oleh nabi-nabi yang  
 menyerah diri pada Allah, oleh orang-orang alim  
 mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan  
 mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah  
 dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu  
 jangan lah kamu takut kepada manusia, (tetapi)  
 takulah kepada-Ku. Dan jangan kamu menukar  
 ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang  
 siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang  
 diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-  
 orang yang kafir”. (QS. Al-Maidah:44)<sup>48</sup>

Konsekuensi jika ada fungsi maka adanya struktur yang  
 dimiliki oleh sistem politik. Struktur yang paling mendasar  
 adalah unsur lembaga pemerintah dan unsur rakyat.

<sup>47</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah:44

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan  
 Penyelenggara Dan Penterjemah Al-Qur'an, 1989), Hal. 167

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup Negara, karena teori politik menyelidiki Negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi Negara dalam keadaan bergerak. Selain dari pada itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan Negara, hakikat Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pendapat umum, peranan partai politik, dan keberadaan pemilihan umum.<sup>49</sup>

#### **D. Etika Politik Dalam Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti dalam bentuk tunggal; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak “*ta etha*” yang artinya adat kebiasaan.<sup>50</sup>

Secara terminologi, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral. Berbeda dengan etika, moral lebih terjuru pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk. Etika juga dapat diartikan dengan beberapa arti sebagai berikut.

1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio
2. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat.
3. Kebenaran yang sifatnya universal dan eksternal
4. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia.
5. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya.
6. Tataan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup.

---

<sup>49</sup> H. InKencana Syafiie, *Op Cit.* Hal.9

<sup>50</sup> K. Bretens, *Etika*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1994) Hal, 4

7. Symbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret.
8. Pandangan tentang nilai perbuatan baik dan buruk yang bersifat relative dan bergantung pada situasi dan kondisi.
9. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang tepat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etik adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral maupun akhlak dalam pandangan filsafat.<sup>51</sup>

Kemudian kata politik dalam bahasa inggris adalah *politic*, yang berarti bijaksana; dalam bahasa latin yaitu *politicus*, dalam bahasa yunani kuno yaitu *politicos*, berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota)<sup>52</sup>. Politik juga berarti hubungan individu satu dengan lainnya yang hidup bersama, dalam dalam hubungan timbal balik sehingga dengan adanya hubungan tersebut diciptakan aturan kewarganegaraan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karnanya pelaku harus cerdas dalam menentukan dan menjalankan tujuan politi.<sup>53</sup>

Istilah politik dalam hukum Islam, menurut pulungan adalah dalam bahasa arab disebut *siyasat*, yaitu berasal dari kata *sasa*. Dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan Al-Arab* berate mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasat* juga dapat

---

<sup>51</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Jakarta:Pustaka Setia, 2012)  
Hal,50

<sup>52</sup> *Ibid.* hal 60-61

<sup>53</sup> Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Politik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997),  
Hal. 19

diartikan membuat kebijakan. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, membuat kebijakan, memimpin, pemerintahan dan politik.<sup>54</sup>

Secara *terminologi siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat sesuai dengan syara'<sup>55</sup> kemudahan Ibnu Manzhur didalam kamus Al-Munjid, mengungkapkan bahwa siyasah artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan yaitu politik politik dalam negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan seluruh umat atas dasar keadilan.<sup>56</sup> Menurut M. Quraish Syihab dalam bukunya yang mengutip dari kamus bahasa arab, kata politik diterjemahkan dengan kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa-yasasa-siyasah* biasanya diartikan "mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya."<sup>57</sup>

Agama Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah saja akan tetapi mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang etika dalam berpolitik yang tercantum dalam hukum Islam, terutama *Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Prinsip etika politik dalam hukum Islam<sup>58</sup> diantaranya adalah:

---

<sup>54</sup> Budi Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hal,15

<sup>55</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta,1994), Hal.74

<sup>56</sup> Ibnu Manzhur, *Kamus Al-Munjid*, (Lisan Al-Arab, 1976), Hal.362

<sup>57</sup> M.Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an ,Tafsirmaudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*,(Bandung,1996, Cet III.), Hal.416

<sup>58</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, , (Bandung, Prenada Media 2003), Hal. 4



## 1. Musyawarah

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ<sup>59</sup>

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka (asy-syuura:38)”<sup>60</sup>

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>61</sup>

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (al-Imran:159)”<sup>62</sup>

## 2. Tanggung Jawab Kepemimpinan

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebut bahwa: dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi saw: *setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya.*<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Al-Qur'an Surat Asy-Syuura:38

<sup>60</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah Surat Asy-Syuura: 38

<sup>61</sup> Al-Qur'an Surat Ali-Imran: 159

<sup>62</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah Surat Ali Imran: 159

<sup>63</sup> Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

3. Kekuasaan ialah Amanah

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾<sup>64</sup>

*“sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(an-Nisaa:58)<sup>65</sup>*

4. Mentaati Allah, Rasulullah, dan Ulil al-Amr

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>66</sup>

*“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasu (Muhammad), dan Ulil Amri (pemimpin) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda*

---

<sup>64</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa:58

<sup>65</sup> Departemen Agama RI Al-qur'an dan Terjemah surat an-nisa':58

<sup>66</sup> Al-qur'an surat an-nisa': 59

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(an-Nisaa:59).<sup>67</sup>

#### 5. Keharusan mengangkat pemimpin

Hadits riwayat Abu Dawud: “ dari Hurairah, telah bersabda Rasulullah Saw.,apabila tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka.”

Oleh karena itu, etika politik adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Politik dapat dipandang sebagai bagian dari penerapan ibadah, dengan demikian mesti diaktualisasikan secara *lillahi ta'ala*. Sebab politik sangat erat kaitannya dengan *developmentalisme civil society*. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً  
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ  
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا  
عَلَمُونَ<sup>٦٨</sup>

“(dan) ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “apakah engkau hendak

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI Al-qur'an surat Terjemah an-nisa': 59

<sup>68</sup> Al-qur'an surat al-baqarah: 30

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Allah berfirman, “sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (al-Baqarah:30).<sup>69</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ<sup>٧٠</sup>

“...sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...(Q.S. ar-Ra'd:11)”<sup>71</sup>

Allah SWT berfirman dalam ayat-Nya:

قُلْ يَتَايَهَاتُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا  
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ  
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تَهْتَدُونَ<sup>٧٢</sup>

“katakanlah (Muhammad), “wahai manusia!  
Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua,

<sup>69</sup>Departemen Agama RI Al-qur'an dan Terjemah surat al-baqarah:

<sup>70</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd:11

<sup>71</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah Surat Ar-Ra'd:11

<sup>72</sup> Al Qur'an surat Al-A'raaf:158

*yang memiliki kerajaan langit dan bumi; (tidak ada tuhan yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah Dia, agar kamu mendapat petunjuk.”(Q.S. al-A’raaf:158)<sup>73</sup>*

#### **E. Penggunaan Sarana Ibadah Untuk Tujuan dan Alat Politik**

Muawiyah bin Abi Sufyan memperoleh tahta dari hasil kekerasan, tipu muslihat dan politik.<sup>74</sup> kekuasaan muawiyah merupakan pengalaman sejarah seorang penguasa yang berhasil menjadi raja berkat penekanan, pemaksaan dan taktik politik yang dilakukannya terhadap semua perselisihan agama dan politik atau perselisihan suku-suku daerah yang ada.<sup>75</sup> Muawiyah menggantikam Ali menjadi khalifah kaum muslimin. Dia menggunakan taktik balas dendam atas terbunuhnya Uthman terhadap Ali (Muawiyah dan Uthman bersaudara, mereka berdua sama-sama dari suku makkah Umayyah atau Abd Syam). Muawiyah memerintah suriah selama 20 tahun dan melancarkan peperangan terhadap Bizantium; sebagai gantinya dia memiliki tentara yang berdisiplin dan terlatih baik untuk melawan orang-orang Badui yang mengikuti Ali.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemah surat Al-A'raaf:158*

<sup>74</sup> M. Mansur Amin, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi Dan Kebangkitan*, (Yogyakarta:LKPSM,1995) Hal.71

<sup>75</sup> Rasul Ja'farian, *Sejarah Islam Sejak Wafat Nabi Saw Hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah*,(Jakarta:Lentera,2004)Hal.476

<sup>76</sup> G.E.Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, (Bandung:Mizan,1993) Hal.25

Muawiyah menjadi awal dari kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun), kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak, suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh *monarchi* di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun, dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya “khalifah Allah” dalam pengertian “penguasa” yang diangkat oleh Allah.<sup>77</sup>

Pembangunan dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak membaia Ali ra, berperang melawan Ali dan melakukan perdamaian (*tahkim*) dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan Muawiyah.

Keberuntungan Muawiyah selanjutnya adalah keberhasilan pihak khawarij membunuh khalifah Ali ra, kemudian jabatan khalifah setelah Ali wafat, dipegang oleh putranya, Hasan bin Ali selama enam bulan. Akan tetapi, karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat, akhirnya Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan bin Ali. Isi perjanjiannya adalah bahwa penggantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam selama masa Muawiyah berakhir. Perjanjian ini disebut pada tahun 661 M (41H). dan tahun tersebut dikenal dengan *am jamaah* karena perjanjian ini mempersatukan umat

---

<sup>77</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), Hal.42

Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu Muawiyah. Dan Muawiyah merubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan.

Pada saat itu, umat Islam telah bersentuhan dengan peradaban Persia dan Bizantiun. Oleh karena itu, Muawiyah juga bermaksud meniru cara suksesi kepemimpinan yang ada di Persia dan Bizantiun, yaitu monarki (kerajaan), akan tetapi, gelar pemimpin pusat tidak disebut raja (*malik*). Muawiyah tetap menggunakan gelar khalifah dengan makna konotatif yang diperbaharui. Jika pada zaman khulafaurrasyidin, khalifah (pengganti) khalifah Rasulullah SAW, adalah pemimpin masyarakat; sedangkan pada zaman Bani Umayyah, yang dimaksud dengan khalifah adalah khalifah Allah adalah pemimpin atau penguasa yang diangkat oleh Allah. Langkah pertama dalam rangka memperlancar pengangkatan Yazid sebagai penggantinya adalah menjadi Yazid Ibn Muawiyah sebagai putra mahkota.

Ketika Muawiyah menjadi pemimpin terjadi banyak kesulitan. Pemerintahan imperium yang didesentralisasikan itu tampak kacau. Munculnya beberapa pemberontakan dan ketidak disiplin kaum nomad yang hidup kembali sesudah mati, dan keadaannya indiscipliner tidak lagi dikendalikan oleh iklan agama dan moral menyebabkan ketidak atabilan dimana-mana dan hilangnya kesatuan umat.<sup>78</sup> Ikatan teokrasi yang telah mempersatukan kekhalifahan yang terdahulu, tanpa dapat dihindari telah dihancurkan oleh pembunuhan Uthman, oleh perang saudara sebagai akibatnya, dan oleh pemindahan ibu kota dari Madinah. Oligarki di Makkah dikalahkan dan dicemarkan. Muawiyah berusaha untuk mencari dasar baru bagi kepaduan imperium. Oleh karena

---

<sup>78</sup>Barnat Lawis, *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), Hal.56



itulah, dia mengubah kedaulatan agama menjadi Negara sekuler. Meskipun demikian, unsur agama di dalam pemerintahan dan pemerintahan tidak hilang begitu saja.

Perubahan-perubahan besar yang menonjol yang dilakukan oleh Muawiyah didalam pemerintahan pada negeri saat itu adalah angkatan daratnya kuat dan efisien. Dia dapat mengendalikan pasukan orang-orang siria yang taat dan setia, yang teptap berdiri disampingnya dalam keadaan yang paling berbahaya sekalipun. Dengan bantuan orang-orang Siria tersebut Muawiyah berusaha mendirikan pemerinyahan yang stabil menurut garis-garis pemerinthan Bizatium. Dia berkerjka keras demi kelancaran sistem yang untuk pertamakalinya digunakan.<sup>79</sup>

Berpindahnya kekuasaan kepada Muawiyah menjadi tanda berakhirnya bentuk demokrasi, kekhalifahan menjadi *monarchi heridetis* (kerajaan turun temurun), yang diperoleh tanpa pemilihan atau suara terbanyak. Penggantian khalifah secara turun temurun dimulai dari sikap Muawiyah yang mengangkat anaknya, yazid, sebagai putra mahkota. Sikap Muawiyah seperti ini dipengaruhi oleh keadaan syiria selama dia menjabat menjadi gubernur disana. Dia memang bermaksud mencontoh *monarchi heridetis* di Persia dan Byzantium.

Pada masa Muawiyah diadakan perubahan-perubahan administrasi pemerintahan, dibentuk pasukan bertombak pengawal raja, dan dia bangun bagian khusus di dalam masjid untuk pengamanan tatkala ia menjalankan shalat. Muawiyah juga memperkenalkan materi resmi untuk pengiriman memorandum yang berasal dari khalifah. Para sejarawan mengatakan bahwa dalam sejarah Islam, Muawiyahlah yang

---

<sup>79</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradapan Islam* (Bandung:Pustaka Setia,2008), Hal 103-105

pertama-tama mendirikan balai-balai pendaftaran dan menaruh perhatian atas jawatan pos, yang tidak lama kemudian berkembang menjadi suatu susunan teratur, yang menghubungkan berbagai bagian Negara.<sup>80</sup>

Pakar sejarah memandang Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dengan siasat dan tipu muslihat yang licik. Ia adalah kepala angkatan perang yang mulai-mulai mengatur angkatan laut, dan pernah dijadikan sebagai amir “al-Bahr”. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdik, cendikia lagi bijaksana, luas ilmu dan siasatnya terutama dalam urusan dunia, ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah menggunakan politik tipu daya dalam membangun daulah Bani Umayyah, meskipun pekerjaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. ia tidak takut melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai.<sup>81</sup>

Tragedy terbunuhnya Uthman bin Affan dan tertuduhnya Imam Ali as sebagai dalang dari pembunuhan menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dan persoalan yang berkobar dan menyebar dengan pesat di kota Syam dan Hamash layaknya sebuah bom yang siap untuk diledakkan. Sebuah persoalan yang Imam Ali as sendiri secara pribadi menyatakan terlepas darinya. Corak agama terhadap persoalan ini dan sensitifitas masyarakat atas terbunuhnya khalifah secara menegaskan telah mengorbankan perasaan masyarakat secara hebat dan nerapi, dan membawa mereka pada perlawanan dan penolakan atas kufah dan kepemimpinan Imam Ali.

---

<sup>80</sup> Ali Sodiqin, Et Al, *Sejarah Peradapan Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyaakarta:Lesfi, 2004), Hal.71

<sup>81</sup>Machfud Syaefudin, *Dinamika Peradapan Islam Persepektif Histori*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), Hal.47

Kegiatannya dalam menyebarkan anti Imam Ali as Muawiyah dan pemerintahan Umawi tidak hanya mencukupkan dari tindakan-tindakan yang telah tersebut diatas, melainkan mereka juga berusaha dengan cara supaya bisa memunculkan kebencian dan kedengkian yang mendalam di dalam diri masyarakat.

Dalam kitab shahih Muslim Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi nomor 2404 diriwayatkan dari saad bin Abi Waqqash:

أَمْرُ مُعَاوِيَةَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا ثُرَابٍ؟  
قَالَ: أَمَّا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا فَأَهَنْ رَسُولَ اللَّهِ، فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي  
وَاحِدَةً مِنْهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خُمُرِ النَّعَمِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَهُ  
وَقَدْ خَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَعَاذِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخَلِّفُنِي  
مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ  
مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي  
يَوْمٍ خَيْرٍ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Ammar putra Sa'ad bi Abi Waqash mengatakan, “suatu hari Muawiyah mengundang ayahku ke hadapannya, kepada ayahku ia berkata, “mengapa kamu tidak mencemooh dan mencela Abu Turab”. Sa’ad berkata, “selama aku masih mengingat tiga kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka aku tidak akan pernah mencelanya, karena seandainya saja salah satu dari hal tersebut adalah untukku, maka hal itu bagiku akan lebih berharga dari unta-unta merah. Rasulullah SAW pada salah satu perang menunjuk Ali ra sebagai wakilnya di Madinah, namun karena keberatan, dia

berkata kepada Rasulullah SAW, “wahai Rasulullah, apakah engkau meletakkanmu sebagai wakilmu atas perempuan dan anak-anak”, Rasulullah SAW bersabda, “Apakah engkau tidak rela bahwa kedudukanmu di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa hanya saja tidak ada Nabi setelahku” dan aku juga mendengar bahwa oada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencitainya.” Kami menunggu, hinggaa kemudian beliau bersabda, “katakana kepada Ali untuk menghadapku “mereka mengantarkan Ali yang saat itu tengah terikat matanya karena luka. Rasul SAW mengoles air ludah mulianya kekedua mata Ali lalu menyerahkan bendera tersebut ke tangannya, dan dengannya telah berhasil membawa kemenangan, demikian jugaa ketika turun ayat berikut. “...maka kataknlah (kepadanyaa), “marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anakmu, istri-istri kami dan istri-istimu, dari kami dan dirimu...”<sup>82</sup> Rasulullah SAW mengajak Ali, Fatimah, Hasan dan Husaaain, kemudian bersabda, “Ya Allah inilah keluargaku”.

Ali bin Muhammad Madyani menulis, “setelah Muawiyah memperoleh kekuasaan dan memegang pemerintahan, ia menulis sebuah surat perintah kepada seluruh pelaksana dan perangkat kerajanya yang di dalamnya mengatakan bahwa, barang siapa mengatakan sesuatu tentang keutamaan Abu Thurrab dan keluarganya maka aku akan melepas tanggung jawabku atas keselamatannya, sementara itu darah dan hartanya akan menjadi sia-sia. Kemudian sesuai dengan perintah ini, seluruh khatib-khatib pada setiap daerah dan setiap mimbar, dalam khotbah-khotbah mereka senantiasa

---

<sup>82</sup> Ali Asghar Ridwani, *Tragedy Karbala Dan Menjawab Berbagai Keraguan Tentangnya*, (Indonesia: Era Of Appaearance Foundation Kuwait, 2008), Hal.52

mengucapkan laknatnya kepada Imam Ali as dan menegaskan tentang kebencian terhadap beliau dan juga mencela dan mencemooh keluarga suci beliau”.menurut Ya’kubi menuliskan, ‘Sebagaimana dari para pengikut Si’ah diantaranya Hajar bin Adi, Amru bin Himaq, dan Khza’I, setiap setiap kali mendengar bahwa Mughairah dan sebagainya yang merupakan sahabat Muawiyah melaknat Imam Ali as di atas Mimbar, maka mereka akan bangkit dan mengembalikan laknatan tersebut kepada mereka.”

Setelah syahadahnya Imam Hasan Mujtaba as, Muawiyah memasuki Madinah untuk melaksanakan ibadah Haji dan ketika hendak melaknat Imam Ali as diatas mimbar Rasulullah SAW, seorang berkata kepadanya bahwa sa’d bib Abi Waqas ada di sini dan aku kira dia tidak akan rela dengan perbuatan ini, utuslah seseorang mendekatinya untuk mencari jawaban atas pendapatnya mengenai hal tersebut.

Muawiyahpun mengirimkan seseorang untuk mendekati sa’d bib Abi Waqas dan menyampaikan perihal yang akan dilakukan oleh Muawiyah. Sa’d berkata, “jika kalian akan melakukan hal ini maka aku akan keluar dari masjid ini dan tidak akan kembali lagi.” Oleh karena itu hingga masa kehidupan sa’d, Muawiyah menghindarkan diri dari melaknat Imam Ali ra. Namun, setelah sa’d meninggal dunia, Muawiyah kembali memulai aksinya untuk melaknat Imam Ali ra dan dia menulis perintah untuk para pelaksana pemerintahannya supaya melaknat Imam Ali di atas mimbar-mimbar masjid.

Merekapun melakukan perintah tersebut. Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW menulis surat kepada Muawiyah yang isinya menyatakan bahwa sesungguhnya engkau telah melaknat Allah dan Rasul-Nya di atas mimbar-mimbar, hal ini terjadi karena engkau telah melaknat orang

yang mereka cintai yaitu Ali bin Abu Thalib, dan aku bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya mencintainya. Tapi Muawiyah tidak menggubris surat Ummu Salamah dan tetap melakukan perbuatan tersebut.

Jahizh menulis, “sesungguhnya Muawiyah pada setiap khutbah hari jumat senantiasa mengatakan, Ya Allah, Abu Thurrab telah terkubur dengan agamam daan jalan untuk menuju-Mu telah terhalangi, maka laknatlah ia dan nerilah azab dan siksaan yang pedih kepadanya. Dan ia menuliskan kalimat ini lalu mengirimkannya ke segala penjuru. Dan laknatan diatas mimbar masjid ini berlanjut hingga masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz”.

Sebagian dari kalangan Bani Umayyah mengatakan kepada Muawiyah, “wahai kaum Amirul Mu’minin. Engkau telah sampai pada keinginanmu, lalu kenapa engkau masih juga tidak menghentikan laknatanmu kepadanya”, Muawiyah berkata, “demi Allah, aku tidak akan menghentikannya, sehingga anak-anak menjadi besar dan terdidik dengan laknatan ini, dan orang-orang yang dewasa menjadi tua dengannya, dengan demikian tidak akan ada lagi seorangpun yang akan mengenang kebaikannya”.<sup>83</sup>

Zamakhsyari menulis, ‘Untuk menghidupkan tradisi Muawiyah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, masyarakat beramai-ramai melaknat dan mencela Ali bin Abi Thalib ada lebih dari tujuh puluh mimbar.

Baladzi berpendapat bahwa, “Muawiyah, menunjuk Mughairah bin Syu’ban untuk menjabat sebagai walikota Kufah, dan Mughairah berkuasa di kota tersebut selama Sembilan tahun dan selama masa pemerintahannya ini dia tidak pernah sekalipun meninggalkan celaan dan laknatan atas Ali ra. “Hakim Neisyaburi dan Abdullah bin Zhalim menukil

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.72

bahwa Mughairah bin Syu'bah senantiasa mencela dan mencemooh Ali ra dalam Khutbahnya dan dia pun memerintahkan para khatib untuk melakukan hal yang serupa.<sup>84</sup>

Abdullah bin Abu Malikah juga memiliki pendapat yang sama bahwa suatu ketika seorang lelaki dari kota Syam melaknat Ali ra dekat Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan, wahai musuh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan”.<sup>85</sup> Jika saja Rasulullah SAW masih hidup, berarti engkau telah menyakitinya.

Abdurrahman bin Bailamani berkata, “Aku telah berada di dekat Muawiyah ketika seorang laki-laki bangkit dan mulai melaknat Ali ra. Mendengar laakntan itu, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail bangkit dan berkata, “wahai Muawiyah, apakah didekatmu aku harus melihat mereka melaknat Ali ra tanpa adanya perubahan apapun pada dirimu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “kedudukan Ali disisiku, sebagaimana kedudukan Harun disisi Musa.

Ahmad bin Hambal dari Abdullah bin Zhalim Mazani menukil, ketika Muawiyah keluar dari kota kufah, dia menempatkan Mughairah bin Syu'bah sebagai pelaksana pemerintahannya disana, dan dia menunjuk para khatib untuk melaknat Ali ra. Mazani berkata, “aku tengah berada di dekat Sa'ad bin Zaid bin Amru bin Nufail, aku melihat dia begitu marah, sambil menarik tanganku dan mengajakku ke sebuah sudut ruangan dia berkata, “apakah engkau tidak melihat lelaki yang mendzalimi dirinya sendiri ini dan memerintahkan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 73

<sup>85</sup> Al-Qur'an Terjemah, *Syamil Quran*, 33 (Al-Ahzab), Hal 57



untuk lelaki dari penghuni surge yakni Ali bin Abi Thalib ra.<sup>86</sup>

Ibnu Abi Al-Hdid mengatakan bahwa Mughairah bin Syu'bah yang ditunjuk oleh Muawiyah sebagai walikota Kufah memerintahkan kepada Hajar bin Adi untuk berdiri di tengah-tengah masyarakat dan melaknat Ali. Dia menolak perintah ini, dan Mughairahpun mengancamnya, dengan terpaksa Hajar bangkit lalu berteriak lantang kepada masyarakat, "wahai warga Kufah sesungguhnya pemimpin kalian memerintahkan kepadaku untuk melaknat Ali, maka laknatlah dia," Masyarakatpun serentak berkata, "Ya Allah, Laknat dia." Maksudnya adalah laknatnya Mughairah.

Salah satu ketidak taatan Muawiyah adalah melakukan perlawanan kepada terhadap imam kaum Muslimin. Seorang imam yang dibaiai oleh mayoritas kaum Muslimin dan mereka memberikan dukungan dan suaranya tanpa paksaan, berbeda dengan imam yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah oleh kekhalifahan. Dan Muawiyah dengan Klaim bohong ingin membahas dandan kematian Uthman yang telah terbunuh dengan mengenaskan, berkehendaak untuk menciptakan fitnah didalam masyaraakat Islam, dengan alasan ini pula lah dia telah mengorbaankan perang siffin dengan maksud supaya bisa menggunakan kodrat dan kekuatan memindahkannya dari Madinah ke Syam.

Setelah meninggalnya Ali ra, hamper semua warga Madinah atau pengikut Ali membaiai anak Ali yaitu Hasan, tatapi Muawiyah tidak mau membainya dan malah berbalik meminta baiat kepadanya, padaa akhirnya dengan terpaksa jabatan khalifahan diberikan kepada Muawiyah dan berdamai dengannya. Salah satu alasan yang telah menyebabkan Imam

---

<sup>86</sup> Ridwani, *Tragedy Karbala Dan Menjawab Berbagai Keraguan Tentangnya*, Op.Cit. Hal 73-74

Hasan terpaksa melakukan perdamaian dengan Muawiyah adalah karena Imam Hasan ra merasakan adanya bahaya yang mengancam keamanan para pengikut Imam Ali. Dari sinilah sehingga dalam perjanjiannya dengan Muawiyah tersebut, beliau menegaskan supaya Muawiyah memberikan jaminan dan keamanan bagi para sahabat dan pengikut Imam Ali, Muawiyahpun menerima persyaratan tersebut.

Ziyad mengumpulkan warga di dalam masjid supaya mereka memperlihatkan kebencian mereka kepada Imam Ali.<sup>87</sup> Di Basrahpun dia mencari para pengikut Si'ah untuk kemudian membunuh mereka. Mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in sampai ke makam ayahandanya dengan perintah Muawiyah.

Tahun 53 H, Hajar bin Adi dan para sahabat terbunuh, dan ia berserta para sahabatnya merupakan orang-orang yang merasakan metode kematian bertahap dalam Islam sehingga ajal merenggutnya. Amru bin Hamaq Haza'I salah seorang sahabat besar yang diberi gelar sebagai sayyidusshuhada' oleh Imam Husain, dibunuh pula oleh Muawiyah tepat setelah ia memberikan janji perlindungan kepadanya.

Muawiyah mengambil baiat untuk anaknya, Yazid. Sebuah baiat yang dari satu sisi berbeda di bawah kilatan pedang, ancaman dan terror, sementara dari sisi lain berada dibawah ketamakan serta unsur suap-menyuap bagi para penyembah perut dan budak-budak syahwat.

Ibnu Abdul Barr dan yang lainnya berpendapat bahwa Muawiyah membacakan sebuah khutbah untuk penduduk Syam dan selain membacakan khutbah tersebut dia juga berkata kepada penduduk, 'wahai penduduk Syam, aku sudah tua dan kematian telah mendekatiku, aku ingin meletakkan tanggung jawab khalifahan ini kepada seseorang yang akan

---

<sup>87</sup> *Ibid.* hal,66

memberikan keteraturan dan kedisiplinan untuk kalian, sebagaimana salah satu dari kalian, maka katakanlah pendapat kalian.” Mereka lalu berkumpul dan melakukan musyawarah, dan setelah selesai melakukan musyawarah, mereka berkata, “kami memberikam keridhaan kami kepada Abdurrahman bin Khalid bin Walid (salah satu dari kalangan sahabat Rasul SAW),”

Usulan ini membuat muawiyah sangat marah, akan tetapi dia menyembunyikan hal tersebut di dalam hatinya, hingga suatu hari dia mendengar Abdurrahman saakit. Muawiyah memanfaatkan kesempatan emas ini dengan memanggil seorang tabib supaya dia medatangi Abdurrahman dan membunuhnya dengan minuman khusus. Tabib yahudi tersebut mendatangi Abdurrahman dan memberikan minuman tersebut kepadanya, kemudian Abdurrahman meminumnya, dan tak lama setelah dia meminum minuman tersebut diapun meninggal dunia. Dan muawiyah melakukan hal ini karena kehendaknya untuk mengangkat anaknya Yazid untuk menggantikannya menjadi khalifah.

At-Thabari meriwayatkan bahwa setelah Hasan ibnu Ali membaiah Muawiyah menjadi khalifah dan setelah Muawiyah masuk kota Kufah, dan rakyat telah berkumpul dimasjid, maka Muawiyah ingin berpidato dimuka rakyat. Ketika itu Amru memberi isyarat kepada Muawiyah supaya ia memberikan Hasan untuk berpidato terlebihdahulu. Tetapi Muawiyah memiliki perasangka buruk terhadap Amru karena itu ia berkata: “apakah engkau tidak senang jika rakyat umum dapat mengetahui dengan jelas kelemahan Hasan”. Dan akhirnya setelah Amru mendesak dengan gigih, maka Muawiyah menyetujuinya, dan ia memberikan kesempatan kepada Hasan untuk berpidato lebih dulu. Maka Hasan mengucapkan suatu pidato yang singkat namun berkesan.

Dalam pidato itu Hasan sempat melancarkan serangan terhadap Muawiyah. Mendengar ucapan itu Muawiyah marah kepada Amru dan berkata: “Beginilah yang kau inginkan, hai Ibnu Ash”<sup>88</sup>



---

<sup>88</sup> A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam II*, (Jakarta:Pt. Pustaka Al-Husna Baru, 2003), 35-36



### **BAB III**

## **PENGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Kampanye Dan Peraturan-Peraturannya**

Bila kita merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, maka kampanye dipahami sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan diparlemen tersebut untuk mendapatkan dukungan massapemilih di suatu pemungutan suara.

Sedangkan bila kita mencoba melakukan pemahaman emik tentang kampanye, maka ia dimengerti sebagai suatu komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar menggunakan atau tidak menggunakan suara seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.<sup>89</sup>

Kampanye politik juga sering disebut pemasaran politik yang merupakan konsep diintrodusir dari penyebaran ide-ide sosial dibidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran penyadaran, sikap dan perubahan prilaku untuk menerima hal-hal baru<sup>90</sup>.

Menurut Arnold Steinberg kapanye politik adalah cara yang digunakan para warga negaraa dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Politik adalah “prktik atau kerjaan menjalaankan urusan politik,”

---

<sup>89</sup> Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta,2012), Hal.468

<sup>90</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep,Teori, dan Strategi*, (Depok:Rajawali Pers, Ed Revisi,2016), Hal.240

yaitu “melaksanakan atau mencari kekuasaan dalam urusan pemerintah.

Kampanye politik adalah, suatu usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan orang yang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi. Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat. Tugas itu pada abad ke Sembilan belas pada hakikatnya sama yakni membujuk sejumlah pemberi suara yang sudah terdaftar untuk mendukung calon anda.<sup>91</sup>

Menurut Pfau dan Parrot kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi halayak sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Pippa Norris kampanye politik adalah sebagai proses komunikasi politik, dimana parpol dan atau kontestan individu berusaha mengomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan.

Menurut Hafied Cangara kampanye politik sebagai aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan prilaku sesuai dengan kehendak penyebar atau pemberi informasi<sup>92</sup>.

Menurut Lileker dan Negrine kampanye politik adalah periode yang diberikan panitia pemilu kepada semua kontestan, baik parpon atau perseorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan.

Menurut Ronald E. Rise Dan Wiliam J. Paisley kampanye politik sebagai strategi control sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk

---

<sup>91</sup>Efriza, *Op Cit*.hal. 469

<sup>92</sup> Hafied Cangara, *Op Cit* Hal.239



menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh parpol.<sup>93</sup>

Menurut hemat penulis kampanye politik adalah sebagai aktivitas komunikasi politik yang dilakukan individu maupun partai politik yang mencalonkan diri untuk menyampaikan visi dan misi serta mempengaruhi masyarakat untuk memberikan suara pada mereka sewaktu pencoblosan.

Secara normatif, aturan kampanye pemilu di media pada saat pemilu legislative 2014 tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada bagian ke enam dari Undang-Undang ini, yang terdiri dari 11 pasal mulai dari pasal 91 tentang ketentuan umum kampanye sampai dengan pasal 101, menyebutkan bahwa kampanye di media yang diatur dalam undang-undng ini adalah yang mencakup pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai iklan kampanye ini diatur dalam peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalm aturan ini disebutkan beberapa poin penting untuk kampanye pemilu di media, diantaranya:

Kampanye pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/kampanye berdasarkan kebijakan redaksional.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, Hal. 470

- b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik
- c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus sebagai peserta pemilih.

Dengan demikian, akhirnya peraturan kampanye yang disusun KPU ini mengalami perubahan dengan diberlakukannya peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan yang dilakukan disini menyangkut 3 pasal krusial yang berkaitan dengan kampanye di media, yaitu:

- a. Pasal 36 ayat (5) diubah menjadi:

Media massa cetak, on-line, elektronik, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang menyiarkan iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Sebelumnya dalam aturan ini juga menyinggung mengenai pelarangan penyiaran berita. Dengan dihapuskannya kata tersebut, maka pemberitaan tetap diperbolehkan.

- b. Pasal 45 ayat (2) diubah menjadi:

Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, dan pasal 43, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatu mengenai penyiaran dan pers.

Sebelumnya pasal ini hanya menyinggung mengenai Undang-Undang Penyiaran. Dengan dicantumkannya Undang-Undang Pers, maka ketentuan berkaitan dengan

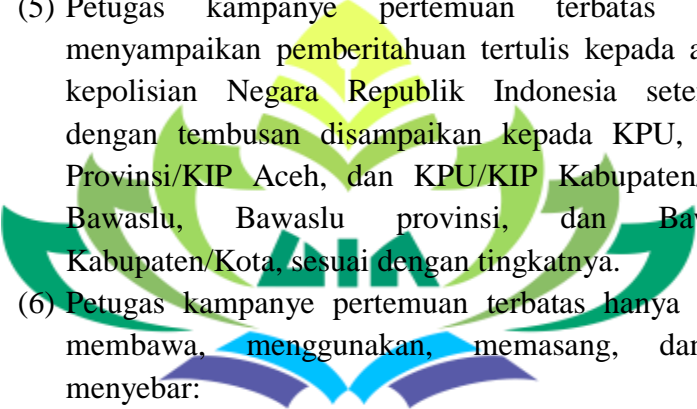
- penyiaran diatur dengan Undang-Undang penyiaran, sedangkan ketentuan terkait dengan pers diatur dengan Undang-Undang pers.
- c. Pasal 46 dihapus. Sebelumnya pasal 46 berbunyi, “sanksi sebagaimana dimaksud dan Pasal 45 ayat (2) dapat berupa, (a) Teguran tertulis, (b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah, (c) pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu, (d) denda, (e) pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu, atau (f) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

Dengan dihapusnya pasal tersebut, ketentuan penjatuhan sanksi tidak dilakukan oleh KPI, melainkan oleh regulator media yang berwenang seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, dan Komisi Informasi.

## **B. Cara-Cara Kampanye Dalam Hukum Positif**

Cara atau metode kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Pertemuan Terbatas
  - (1) Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas
  - (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
    - a. di dalam ruangan; atau
    - b. di gedung tertutup.
  - (3) Peserta kampanye yang di undang pada tempat pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat

- 
- (1) disesuaikan dengan kapasitas ruang yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
    - a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
    - b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
    - c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
  - (4) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta petugas kampanye.
  - (5) Petugas kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya.
  - (6) Petugas kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebar:
    - a. Bendera, tanda gambar, atau Peserta pemilu; dan/atau
    - b. Bahan kampanye.
2. Pertemuan Tatap Muka
- (1) Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan:
    - a. Di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
    - b. Di luar ruangan
  - (2) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

- b. Peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dengan bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- (4) Petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud harus mencakup informasi:
- a. Hari;
  - b. Tanggal;
  - c. Jam;
  - d. Tempat;
  - e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
  - f. Jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. Penanggung jawab.
- (6) Petugas kampanye pertemuan tatap muka dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
3. Penyebaran Bahan Kampanye
- (1) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud dapat berbentuk:
- a. Selebaran (*flyer*);
  - b. Brosur (*leaflet*);
  - c. Pamphlet;
  - d. Poster;

- e. Pakaian;
  - f. Penutup kepala;
  - g. Alat minum/makam;
  - h. Kalender;
  - i. Kartu nama;
  - j. Pin; dan/atau
  - k. Alat tulis.
- (2) Ukuran selebaran, brosur, pamphlet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud huruf a sampai e adalah:
- a. Selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm.
  - c. Pamflet, paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm
  - d. Poster, paling besar ukuran 40 cm x 60 cm; dan
  - e. Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- (3) Desain dan materi pada Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi misi, dan program Peserta Pemilu.
- (4) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
4. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum
- (1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud adalah meliputi:
- a. Baliho, *billboard*, atau *videotron*
  - b. Spanduk; dan/ atau
  - c. Umbul-umbul.
- (2) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud adalah:
- a. 4 (empat) m x 7 (tujuh) m;
  - b. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 m x 7 m; dan
  - c. Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 m x 7 m.

- (3) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
  - (4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebaagaimana dimaksud dilarang berada di:
    - a. Tempat ibadah, termasuk halaman;
    - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - c. Gedung milik pemerintah; dan
    - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Media Sosial
- (1) akun media sosial sebagaimana dimaksud dapat disebut paling banyak 10 untuk setiap jenis aplikasi.
  - (2) Desain dan materi pada media sosial sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.
  - (3) Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dapat berupa:
    - a. Tulisan;
    - b. Suara;
    - c. Gambar; dan/atau
    - d. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang daapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  - (4) Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud:
    - a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu Anggota DPR;
    - b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Peserta Pemilu Anggotaa DPD dan DPRD Provinsi; dan
    - c. KPU/KIP Kbupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.



## 6. Iklan Kampanye

- (1) Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui iklan kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud serta lembaga penyiaran.
- (2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu.
- (3) Materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud dapat berupa:
  - a. Tulisan;
  - b. Suara;
  - c. Gambar; dan/atau
  - d. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

## 7. Rapat Umum

- (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan:
  - a. Di lapangan;
  - b. Stadion;
  - c. Alun-alun; atau
  - d. Tempat terbuka lainnya.
- (2) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan daya tampung tempat.
- (3) Rapat umum sebagaimana dimaksud dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- (4) Petugas kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya.

8. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- (1) Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh KPU.
- (2) Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud diselenggarakan sebanyak 5 kali pada masa kampanye, dengan rincian:
  - a. 2 kali untuk calon Presiden; dan
  - b. 1 kali untuk calon Wakil Presiden; dan
  - c. 2 kali untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
- (3) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- (4) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

9. Kegiatan Lain

- (1) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Kegiatan kebudayaan, meliputi pantas seni, panen raya, dan/ atau konser music;
  - b. Kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai dan/atau sepeda santai;
  - c. Perlombaan;

- d. Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlago Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
  - e. Kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- (2) Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*)<sup>94</sup>.

### C. Kampanye Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
2. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walokota.
3. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

---

<sup>94</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

4. Kampanye dapat dilaksanakan melalui
  - a. Pertemuan terbatas
  - b. Pertemuan tatap muka dan dialog
  - c. Debat public/debat terbuka antar pasangan calon
  - d. Penyebaran bahan kampanye pada umum
  - e. Pemasangan alat peraga
  - f. Iklan media masa cetak dan media massa elektronik dan/atau
  - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kampanye difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
6. Kampanye dapat didanai oleh dan dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon.
7. debat publik/debat terbuka antar calon dilaksanakan paling banyak 3 kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8. Debat disiarkan langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.
9. Materi debat adalah visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Memajukan daerah.
  - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - d. Menyelesaikan persoalan daerah.
  - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan nasional; dan

- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan<sup>95</sup>.

Larangan kampanye menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat dalam pasal 69:

- a. Mempersoalkan dasar Negara pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadudomba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- k. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>96</sup>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Larangan dalam Kampanye adalah:

1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.
3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik.
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Melaksanakan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota.
10. Menggunakan tempat ibadah dan tmpat pendidikan.

---

<sup>96</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

11. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
12. Dalam kegiatan Kampanye, pasangan calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
  - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara.
  - b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain.
13. Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
14. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
15. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan.
16. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
17. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan kampanye di media massa cetak dan media massa Elektronik



18. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilihan<sup>97</sup>.

#### **D. Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Dalam Undang-Undang**

Media kampanye menurut, Schramm adalah sebagai perantara apa pun yang memungkinkan pesan-pesan sampai kepada penerima. Sementara Klingemann dan Rommele secara spesifik mengartikan media kampanye sebagai segala bentuk medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Bentuknya dapat berupa kertas yang digunakan untuk menulis pesan, telepon, dialog publik, penyuluhan, poster, spanduk, internet/media sosial, surat kabar, radio, atau televisi<sup>98</sup>. Dalam kampanye terdapat media yang diperbolehkan dan dilarang untuk dipergunakan sebagai media kampanye, berikut adalah media yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai media kampanye:

##### **1. Media cetak**

Media cetak adalah saluran komunikasi di mana pesan-pesan verbalnya (tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik dilakukan dalam bentuk tercetak. Contohnya surat kabar, poster, sepanduk dan media cetak lainnya.

##### **2. Media elektronik**

Berbeda dengan media cetak, media elektronik pesan-pesannya disampaikan melalui getaran listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya

---

<sup>97</sup> Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

<sup>98</sup> Antar Venus, *Op Cit.* Hal.141

televise dan radio. Kelebihan media massa adalah bisa menembus ruang dan waktu, sehingga informasinya sangat cepat dan serempak meliputi semua wilayah yang berada dalam radius penerimaan<sup>99</sup>.

3. Media format kecil

Media format kecil biasanya terdiri atas berbagai macam media, tetapi bentuknya lebih kecil, dan isinya kadang terfokus pada satu macaam informs. Mudah dibawa kemana-mana dan mudah menarik perhatian orang banyak. Bentuk media cetak kecil adalah lukisan, artifact, bulletin selebaran, brosur, kalender, setiker, pin dan lain sebagainya<sup>100</sup>.

4. Saluran komunikasi kelompok

Peranan kelompok dalam konteks politik sangat penting karena menjadi saluran komunikasi politik untuk berhubungan dengan sesama pengurus dan anggota maupun dengan masyarakat pemilih.

5. Saluran komunikasi publik

Komunikasi publik berbeda dengan komunikasi massa , sebab komunikasi publik sifatnya tatap muka, terbuka daan langsung, sementara komunikasi massa diantarai oleh media, dan tidak bertatap muka langsung. Selain itu komunikasi publik sering hanya dihadiri oleh komunitas tertentu, misalnya agama atau partai yang sama<sup>101</sup>.

6. Internet dan media sosial

Internet dan media sosial sangat efektif digunakan sebagai media kampanye karena media sosial

---

<sup>99</sup> Hafied Cangara, *Op Cit.* Hal. 332

<sup>100</sup> *Ibid*, Hal. 333

<sup>101</sup> *Ibid*, Hal. 334

jangkauannya sangat luas dan dapat dengan cepat sampai kepada penerima informasi<sup>102</sup>.

## 7. Telpn seluler dan SMS

Dalam konteks politik, telepon seluler ternyata bisa menjadi sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam menggalang kerja sama dan percepatan mobilitas organisasi dan partai<sup>103</sup>.

Selain media yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai media kampanye terdapat pula media yang dilarang untuk digunakan untuk melakukan kampanye salah satunya yaitu:

### 1. Melakukan kampanye ditempat ibadah

Larangan menggunakan tempat Ibadah saat kampanye Pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Kemudian Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat dalam pasal 69 huruf i.

Kampanye pemilihan kepala daerah kampanye pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Hal. 347

<sup>103</sup> *Ibid*, Hal. 345

jawab, dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU sesuai dengan pemilihan. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU sesuai dengan daerah pemilihan dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tetap muka dan dialog;
- c. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kampanye, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon dilarang melakukan kampanye ditempat ibadah yaitu terdapat pada pasal 69 huruf I Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Jadi melakukan kampanye ditempat ibadah merupakan hal yang dilarang termasuk kegiatan di tempat ibadah yang bersangkutan<sup>104</sup>. Dengan alasan, menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi, beliau berkata masjid tidak salah digunakan sebagai tempat untuk memberi anjuran mengenai etika politik kepada masyarakat. Misalnya berupa sikap saling menghormati perbedaan dalam berpolitik. Termasuk juga menanamkan jiwa toleransi dan persaudaraan dalam berpolitik.

Pendidikan politik di masjid, mesti berupa politik kemuliaan. Bukan politik praktis. Yang bernuansa politik

---

<sup>104</sup> <https://m.hukumonline.com> diakses tanggal 28/12/2018 pukul 09.30 WIB

kekuasaan. Menurut zainut, masjid jelas tidak boleh dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan politik praktis. Misalnya kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu.

Masjid juga harus bersih dari ujaran kebencian dan fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang didasari atas kepentingan politik. Masjid pun tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang sah. Karena kampanye seringkali diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba.

Beliau juga mengatakan bahwa masjid merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan beribadah. Seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, politik, dan paham keagamaan yang berbeda bertemu di masjid.

Siingga dapat dipastikan akan terjadi gesekan, konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid tersebut dipakai untuk tempat kampanye<sup>105</sup>.

Sanksi apa bila melakukan kampanye di tempat ibadah adalah:

- a. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilih lainnya.

Tidak hanya melakukan kampanye ditempat ibadah saja yang dilarang akan tetapi termasuk menempel stiker dan emasangan alat peraga di tempat ibadah dan halamannya.

---

<sup>105</sup> <https://m.cnnindnesia.com> diakses tanggal 28/12/2018 pukul 10.00 WIB

## **E. Kasus-Kasus Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye di Indonesia**

Kasus-kasus penggunaan masjid sebagai media kampanye yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pemilu legislatif (pileg) 2014 seorang caleg disidang karena melakukan kampanye di tempat ibadah. Caleg yang terjerat masalah tersebut adalah H. Muh Muji Mulyono. Dia adalah caleg PKB kabupaten Malang untuk tingkat DPRD kabupaten. Kasus yang menjeratnya adalah proses kampanye dilakukan ditempat ibadah, yakni masjid Raudatul Muslimin, pada 9 Maret 2014. Kasus terjadi ketika diadakannya pengajian dimasjid tersebut kemudian dia berkampanye saat ada pengajian, kejadiannya di Dusun Salamrejo Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo. Setelah ditindak lanjuti oleh Panwaslu setempat, kasus ini diproses hingga kepolisian. Diri pemeriksaan, caleg ini kemudian dijerat pasal 86 ayat 1 huruf h jo Pasal 299 UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan DPD. Dan terancam hukuman pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta<sup>106</sup>.
2. Rafani mengatakan bahwa ia menemukan salah satu penceramah melakukan kampanye dimasjid didaerah Bandung Barat Jawa Barat pada saat pilgub Jawa Barat tahun 2018 ia dengan jelas mengarahkan jamaahnya untuk memilih salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengarahkan pasangan nomor mana yang harus dipilih<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> <https://regional.kompas.com>, 28-03-2014 diakses tanggal 08-12-2018 pukul 21,15

<sup>107</sup> <https://tirto.id>>15/10/2018 diakses tanggal 08-12-2018 pukul 21.20

3. Sepanduk berukuran raksasa bertuliskan “#2019Gantipresiden” membentang dihalaman Masjid Al-Amin Medan, Sumatra Utara, viral dimedia sosial. Spanduk itu membentang dipagar depan Masjid menyambut kedatangan para jamaah. Namun pelaku belum diketahui akan tetapi pihak Kapolsek Medan Timur, Kompol Wilson Pasaribu sedang mencari siapa yang memasang sepanduk tersebut<sup>108</sup>.
4. Ketua pengawas pemilu kabupaten Aceh Tamiang Muhammad Khuwalid, jumat (9/12/2016) mengatakan ada dugaan salah satu paslon bupati Aceh Tamiang yang melakukan pelanggaran yaitu melakukan kampanye di rumah ibadah. Kemudian ia melanjutkan jika laporan tentang dugaan berkampanye di dalam masjid itu benar, maka pihak paslon tersebut telah melakukan pelanggaran<sup>109</sup>.

---

<sup>108</sup> <https://m.watytutink.com> topic politika 8/5/2018 diakses tanggal 8/12/2018 pukul 21.20

<sup>109</sup> <https://m.goaceh.com> 9/12/2016 diakses tanggal 8/12/2018 pukul 21.30





## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye**

Di dalam hukum Islam, belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti kegiatan mengajak seseorang dengan cara memberikan visi misi yang meyakinkannya.

Praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye sudah ada sejak dinasti Bani Umayyah ya itu pada masa kekuasaan Muawiyah dimana pada masa pemerintahannya Muawiyah mewajibkan setiap khatib melaknat Ali diatas mimbar-mimbar masjid.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye dalam pandangan hukum Islam adalah sekelompok tim kampanye berbasis Islam yang dibentuk dari partai politik atau gabungan dari partai politik tertentu. Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat islam dalam kamcah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu bangsa. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat islam untuk berjuang secara individual dan kelompok. Di dalam hukum Islam, partai politik disebut dengan istilah *al-Hizb al-siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang

memperjuangkan nilai-nilai islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada tingkat legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui pemilihan umum serta melakukan kampanye yang berbasis islam dengan menjual isu dan program-program yang tidak menyimpang dari nilai-nilai ideologi Islam.

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. Dalam Q.S. Yusuf ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ط

*“berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, berpengetahuan”*

Tafsiran ayat diatas menurut pendapat para ulama Al-Allamah Al- Athusi (w.1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak kenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Jabatan (kekuasaan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk berbuat adil serta taat terhadap hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin.

Berdirinya masjid itu sendiri pada awalnya adalah untuk menciptakan kemakmuran umat serta sarana pemersatu umat dengan berbagai upaya maka dalam rangka mencapai tujuan

tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masjid agar cita-cita menciptakan umat yang sejahtera dapat terwujud.

Dengan berkembangnya umat Islam di Madinah dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat kota yang kemudian menjadi Negara, fungsi masjid berubah di masjid itu lah Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran Islam, nasihat dan pidatonya kepada umat Islam. di masjid ini pula lah Rasulullah SAW bertindak sebagai hakim dan memutuskan persengketaan-persengketaan umat. Disini pula lah Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau mengatur siasat perang dan siasat Negara pun di masjid. Ringkasnya masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan, politik, dan militer kenegaraan pada era klasik. Dengan demikian masjid berfungsi untuk membina peradapan dan kebudayaan, tempat ibadah dan tempat pengendalian urusan pemerintahan dan kenegaraan.

Masjid pada zaman Nabi menjadi pusat kegiatan untuk membina masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam satu kesatuan sosial satu kesatuan politik. Kaum Anshar dan Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam, berasal dari suku-suku yang berselisih. Melalui masjidlah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang tidak hanya bersatu padu secara internal, tetapi juga diakui dan bahkan disegani oleh pihak lain.

Setelah Nabi wafat, keadaan tidak banyak berubah, masjid masih digunakan sebagai pusat pemerintahan di masa khulafaur rasyidin baru pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab mulai dibangun gedung pemerintahan dan baitul mal di sekitar masjid.

Jika diklasifikasikan, masjid sebagai sarana politik pada masa itu digunakan sebagai:

1. Sebagai tempat latihan perang
2. Balai penghambatan tentara muslim yang terluka
3. Masjid sebagai tempat musyawarah
4. Tempat menerima tamu
5. Tempat penahanan tawanan perang
6. Pengadilan
7. Masjid sebagai baitul mal

Pada masa pemerintahan Bani Abbas terjadi perubahan masjid sudah tidak lagi digunakan sebagai pusat pemerintahan karena pemerintah telah membangun sebuah istana sebagai pusat pemerintahan. Namun masjid masih digunakan sebagai tempat para khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting.

Fungsi masjid saat ini jika dibandingkan dengan zaman klasik sudah banyak yang bergeser, jika dulu masjid multifungsi, kini masjid hanya berperan hanya beberapa bidang saja dengan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran-pemikiran politik islam yang tumbuh dan berkembang di era modern.

Sebenarnya fungsi masjid tidak hilang begitu saja dari umat akan tetapi karena satu persat fungsi masjid sudah diambil alih oleh lembaga lain. Dizaman sekarang ini sudah ada lembaga-lembaga baru yang mengambil alih peran tersebut adalah seperti organisasi-organisasi keagamaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintahan, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhrawi umat beragama. Lembaga-lembaga itu memiliki kekuatan material dan teknis melebihi masjid.

Menurut hemat penulis mengapa masjid dizaman Rasulullah SAW menjadi pusat pemerintahan sedangkan dizaman modern dilarang melakukan kampanye di masjid yang merupakan salah satu dari kegiatan politik? Hal ini disebabkan karena pada masa Rasulullah SAW belum terdapat lembaga-lembaga pemerintahan seperti saat ini maka dari itu masjid merupakan tempat yang sangat strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan akan tetapi karena di masa sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi-fungsinya masing-masing sehingga fungsi masjid diambil alih oleh lembaga tersebut.

Jika dianalisis, fungsi masjid sebagai sarana politik bukan hilang sama sekali masjid masih digunakan sebagai tempat pendidikan yang dimana di dalamnya dimasukkan nilai-nilai politik dan membentuk karakter politik umat yang dapat ditanamkan sejak kecil. Pembinaan umat di masjid pada masa lalu masih bersifat objektif dan adil karena tidak ada partai politik pada saat itu. Namun, fenomena kampanye pada masa sekarang ini banyak sekali diwarnai dengan ujaran kebencian dan saling memfitnah antar pasangan calon sehingga dikhawatirkan akan memecah belah jamaah masjid dan juga dapat merusak citra masjid itu sendiri yang merupakan tempat suci umat Islam. dan bahaya yang lain jika masjid digunakan untuk kampanye saat ini maka masjid akan berubah menjadi kampanye partai dan akan terjadi saling serang, saling tuduh-menuduh dan ujaran kebencian.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Mengenai Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye.**

Sesungguhnya fungsi terbesar masjid adalah untuk mengagungkan Allah SWT dan membesarkan nama-Nya

sebagai mana telah dijelaskan pada surah an-Nur:36-37 sebagaimana telah dipaparkan dalam BAB II.

Di ayat pertama, Allah menjelaskan bahwa fungsi masjid adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Kemudian di ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar menegakkan peribadatan kepada-Nya, tidak lah menjadi terlalaikan untuk beribadah hanya karena mengurus perniagaan dan pekerjaannya. Apalagi sampai tega menjadikan masjid sebagai tempat berniaga.

Dengan demikian semangat yang dibangun dalam pendirian masjid adalah semangat akhira, mengagungkan dan membesarkan nama Allah. Karena itu tidak heran jika Allah memuji orang mukmin yang menggunakan masjid sesuai fungsinya.

Apa lagi berkampanye di masjid hal yang pasti ada adalah menjunjung tinggi partai itu, berikut tokoh-tokohnya. Karena itulah tujuan utama kampanye partai. Ketika partai disanjung di masjid, bukankah ini mengalih fungsikan masjid yang seharusnya untuk mengagungkan Allah. Yang seharusnya seluruh makhluk bersikap khusyu, tunduk, dan merendahkan diri di hadapan Allah, di saat yang sama, dia menyanjung makhluk Allah. Berikut adalah contoh kampanye politik masjid yang membawa mudharat:

1. Pengusiran terhadap Calon wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat di masjid Al-Atiq, Kebun Baru, Tebet. Pengurus besar Nahdatul Ulama Falah Amru mengatakan jamaah yang melakukan pengusiran sama saja telah menghina agama Islam. dan pengusiran tersebut adalah bentuk politisasi masjid. Yang dilakukan orang-orang yang mengatas namakan agama. Ia mengatakan itu bentuk penghinaan terhadap agama Islam yang rahmatan lil alamin. Sedangkan pengusiran

adalah bentuk radikalisme agama. Falah juga mengatakan Djarot adalah nahdliyin. Jika para jamaah tidak suka maka jangan memilihnya pada saat pemilu bukan malah mengusir dari masjid.

2. Pemecatan Pembina masjid Darussalam, Rasyid Nawi karena beda pilihan dan selain itu pengurus masjid juga sepakat tidak akan menshalatkan jenazah warga yang diketahui memilih Ahok Djarot. Ini terjadi pada almarhumah Siti Rohbaniah, usia 80 tahun warga RT5/RW02 yang meninggal dunia pada saat itu. Kemudian warga dan pengurus masjid menganggap Rohbaniah memilih pasangan Ahok-Djarot. Beberapa jam kemudian salah satu pengurus masjid baru tahu jika Rohbaniah tak punya hak pilih karena tidak memiliki KTP Jakarta baru lah warga dan pengurus masjid mau menshalatkan jenazah dengan syarat keluarga almarhumah memberikan pernyataan bersedia memilih pemimpin muslim.
3. Ketua dewan kehormatan partai amanat nasional (PAN) Amin Rais berkhotbah di masjid Rumah Sakit Islam Sukapura, Jakarta Utara saat hari raya Idul Adha 1437 Hijriah lalu. Dalam khotbahnya ia mengingatkan jamaah yang hadir agar tidak memilih gubernur yang sering menggusur serta berpihak kepada pemodal. Yang dimaksud calon gubernur tersebut adalah Ahok.

Meskipun itu tidak dinilai sebagai perbuatan kesyirikan, namun semangat kampanye untuk menyanjung partai, tentu saja bertentangan dengan semangat fungsi utama masjid, yaitu mengagungkan Allah.

Hasanudin Abdurajhman (tokoh cendekiawan) berpendapat bahwa masjid adalah tempat suci yang tidak patut bila dipakai untuk kegiatan politik. Asumsinya, masjid

itu suci, politik itu kotor. Melakukan kegiatan politik di masjid artinya mengotori masjid.

Tokoh Nahdatul Ulama Mahfud MD berpendapat bahwa masjid mestinya menjadi medium untuk berdiskusi bersama tanpa memandang golongan. Menurutnya dalam tataran konsep, semua khotbah itu politis. kalau “politik” dalam arti baik sebagai inspirasi atau kebijakan, misalnya “hendaknya kamu berbuat adil di kehidupan” pemerintah diminta berbuat adil, menegakkan hukum kepada siapapun maka itu boleh. Tapi politik dalam arti kelompok-kelompok politik seperti memuji suatu kelompok politik dan menjatuhkan kelompok politik lain maka itu tidak boleh. Kemudian beliau menegaskan kembali jangan bicara politik praktis di masjid.

Tokoh sosiolog Universitas Gadjah Mada M. Najib azca, berpendapat ketika tempat ibadah dipolitisasi, kemudian menjadi tempat ibadah pendukung A dan melarang pendukung B, itu merusak saklaritas agama yang agung, mulia, dan merangkul semua makhluk. Ia menekankan masjid seharusnya menjadi ruang berfikir jernih untuk membicarakan masalah umat tanpa dikeruhkan oleh kepentingan perseorangan. Dalam jangka panjang, politisasi masjid berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa.

Kita bisa memastikan, ketika ada satu partai melakukan kampanye di masjid, tentu tidak semua orang Islam jamaah masjid itu, simpati dengan partai tersebut. Sehingga keberadaan partai di masjid itu, menjadi sebab terjadinya perpecahan di tengah jamaah masjid. Atau bahkan menjadi penyebab, sebagian mereka menjadi enggan untuk shalat disana, gara-gara masjidnya digunakan untuk kampanye partai yang tidak dia sukai.

Berdasarkan uraian diatas pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai



larangan menggunakan masjid sebagai media kampanye sudah sesuai dengan syariat Islam mengingat dilarangnya mengagungkan nama selain nama Allah di dalam masjid dan dapat memecah persatuan jamaah masjid.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan mengenai kampanye menggunakan media masjid dapat disimpulkan bahwa:

1. Kampanye yang dilakukan di masjid jika dilihat dari teori fungsi masjid di masa Rasulullah SAW. Memang masjid pada masa Rasulullah SAW berfungsi sebagai pusat pemerintahan termasuk politik boleh dilakukan di masjid dikarenakan pada masa itu memang belum ada lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat mengambil alih fungsi masjid seperti pada saat ini. Namun, pada masa Rasulullah kegiatan politik di masjid bukan berupa politik praktis seperti kampanye praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye dilakukan pada masa pemerintahan Muawiyah pada masa dinasti Bani Umayyah dimana pada saat itu Muawiyah memerintahkan seluruh khatib-khatib melaknat Ali di atas mimbar-mimbar masjid pada khatbah jumat. Pada saat ini memang fungsi masjid memang sudah tidak sama dengan masa klasik karena memang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman fungsi masjid sudah diambil alih oleh lembaga pemerintahan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang pada masa klasik belum terdapat lembaga pemerintahan seperti masa modern. Namun, dari masa Rasulullah praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye tidak pernah terjadi, maka penggunaan masjid sebagai tempat kampanye tidak memiliki dasar hukum didalam fiqh siyasah.

2. Pandangan fiqh siyasah terhadap larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Apa bila kampanye dilakukan di masjid yang tidak semua jamaah masjid tersebut bersimpati dengan partai politik ataupun calon pemimpin yang berkampanye maka dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan antar jamaah masjid yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa larangan kampanye menggunakan media masjid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sesuai dengan sariat Islam dimana berdasarkan Q.S. an-Nur:36-37 yang telah dipaparkan pada BAB II bahwa dilarang mengagungkan nama selain nama Allah di masjid karena apa bila berkampanye di masjid sudah dapat dipastikan menjunjung tinggi partai ataupun tokoh-tokoh yang berkampanye. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

## **B. Saran**

Saran dari penulis, bagi para calon yang maju pada pilkada maupun pemilu sebaiknya tidak mempolitikasikan tempat ibadah (masjid) sebagai tempat untuk mencari suara. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan apalagi menggunakan tempat yang mulia bagi umat islam untuk kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan.

Perlu adanya sosialisasi dari pihak berwenang agar para calon tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan bila perlu diberikan sanksi yang tegas dan berat bagi para pelanggar.

## DAFTAR PUSATAKA

### Sumber Buku

- A.Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung. Prenada Media 2003.
- Ali Sodiqin, Et Al. *Sejarah Peradapan Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyaakarta:Lesfi, 2004
- Ali Asghar Ridwani. *Tragedy Karbala Dan Menjawab Berbagai Keraguan Tentangnya*. Indonesia: Era Of Appaearence Foundation Kuwait. 2008
- Amani Jamal. *The Role Of Mosque In The Civic And Political Incorporation Of Muslim America*, Teachers College-Comlumbia University. Diakses Tanggal 19 November 2018 Pukul 14.30 WIB.
- Amiruddin dan Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2006
- Antar Venus. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2009
- Asep Usman Ismail dan Cecep Cstrawijaya. *Manajemen Masjid*. Bandung:Angkasa.2010.
- A.Syalabi,*Sejarah dan Kebudayaan Islam*. cet.VI. Jakarta Pusat: Pustaka Alhusna.1992
- Ayi Sofyan. *Etika Politik Islam*. Jakarta:Pustaka Setia. 2012.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradapan Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Barnat Lawis. *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988

Budi Irawan Maksudi. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Dedi Supriyadi *Sejarah Peradapan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2008

Delier Noer. *Pengantar Kepemikiran Politik*. Medan: Dwipa. 1965. Cet. I

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung,: PT Sigma Examedia Arkanleema. Tt

Departemen P Dan K. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995. Cet. Ke-8

Ebta Stiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2016.

Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta. 2012.

G.E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*. Bandung: Mizan, 1993

*Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim*.

Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Depok: Rajawali Pers. Ed Revisi. 2016

H. Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010

Huri Yasin Husain, *Fiqh Masjid*, Jakarta: Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011

Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, Ter, Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000

Ibnu Manzhur, *Kamus Al-Munjid*, Lisan Al-Arab, 1976

Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

----- *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014

----- *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002

K. Bretens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2000

Marbu. BN, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004

Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Machfud Syaefudin. *Dinamika Peradapan Islam Persepektif Histori*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013

Mohammad, E. Ayub, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani, 1996

Muhammad Faud Abdul Baql, *Al-Lu'lu' Wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim, Jilid I*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ed. Darmadi, Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000

M. Mansur Amin, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi Dan Kebangkitan*, Yogyakarta: LKPSM, 1995

M.Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, 1996, Cet III

Nur Handriyat Alsyah, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*. Malang: UIN Maliki Press

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: GOZIAN Press, 2013

Ridho Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam di Zaman Rasulullah Saw*. Jakarta: 1976

Rasul Ja'farian. *Sejarah Islam Sejak Wafat Nabi Saw Hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah*. Jakarta: Lentera, 2004

Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, Cet V, 1989

Suprianto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid*, Jakarta: Cahaya Hukumah, 2003

Sugiono, *metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Venus Antar. *Menejemen Kampanye*. Bandung: Simbiosis



Rekatama Media,2012.

-----*Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2009

-----Antar, *Menejemen Kampanye;Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengfektifkan Kampanye Komunikasi.* Bandung:Simbiosis Rekaatam Media, 2004.

Wahyudin Sumpeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya.*Ed.Abdul Hamid, Bandung:Remaja Rosdakarya.Cet-1, 1984

Wojo Wasito Dan Poerwadaminta, *Kamus Lengkap* Bandung: Hasta, 1980

Yusuf Al-Qordhawi, *Tuntunan Membangun Masjid, Ter Abdul Hayyie Al- Kattani, Ed. Darmadi,* Jakarta: Gema Insani Press, Cetakan I, 2000

### **Sumber Jurnal**

Abdul Malik Ghazali, Aborsi Antara Hukum Dan Dilemma Perempuan, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.9 No.1, Juni 2010.

### **Sumber on-line**

<http://lannilamenda.blogspot.co.id/2012/12/definisi-jenis-jenis-dan-perbedaan.html> diakses 16 April 2018

<https://m.hukumonline.com> diakses tanggal 28/12/2018 pukul 09.30 WIB

<https://m.cnnindonesia.com> diakses tanggal 28/12/2018 pukul 10.00 WIB

*<https://regional.kompas.com>, 28-03-2014 diakses tanggal 08-12-2018 pukul 21,15*

<sup>1</sup>*<https://tirto.id>>15/10/2018 diakses tanggal 08-12-2018 pukul 21.20*

*<https://m.watyutink.com> topic politika 8/5/2018 diakses tanggal 8/12/2018 pukul 21.20*

*<https://m.goaceh.com> 9/12/2016 diakses tanggal 8/12/2018 pukul 21.30*

[www.pengertianahli.com/pengertian](http://www.pengertianahli.com/pengertian) media dan jenis media menurut para ahli diakses 18 April 2018

